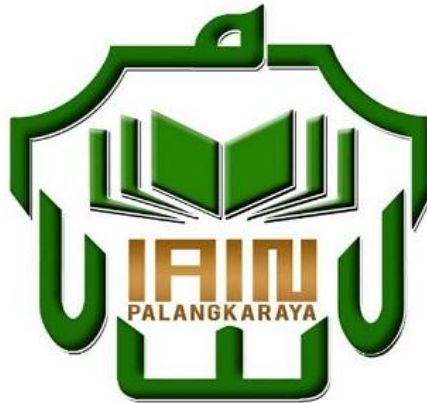


**PENGENDALIAN PIUTANG PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN
ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam



Oleh

WAHDIAH
NIM. 1302120227

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AJARAN 2017 M / 1438 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGENDALIAN PIUTANG PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd) DI KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN
BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

NAMA : WAHDIAH

NIM : 130 212 0227

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Maret 2017

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Ali Sadikin, M.S.I
NIP. 198403212011011012

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

Jelita, M.SI
NIP. 198301242009122002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Wahdiah

Palangka Raya, Maret 2017

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari :

Nama : **WAHDIAH**

Nim : **130 212 0227**

Judul : **PENGENDALIAN PIUTANG PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd) DI KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN
BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Ali Sadikin, M.S.I
NIP. 198403212011011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGENDALIAN PIUTANG PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN** oleh Wahdiah NIM : 1302120227 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 April 2017

Palangka Raya, 18 April 2017

Tim Penguji

1. M. Zainal Arifin, M.Hum (.....)
Ketua Sidang
2. Dr. Sadiani, MH (.....)
Penguji Utama/I
3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag (.....)
Penguji II
4. Ali Sadikin, M.SI (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

**PENGENDALIAN PIUTANG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)
DI KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN**

ABSTRAK

Oleh WAHDIAH

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-5 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007, di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah upaya penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan, salah satu yang masih bertahan hingga sekarang adalah pemberian piutang oleh PMPM-MPd, yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan / UPK. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengendalian piutang diterapkan oleh UPK. Beranjak dari rumusan masalah: yaitu (1) Bagaimana sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK ? (2) Bagaimana kolektibilitas piutang pada UPK ? (3) bagaimana efektivitasan sistem pengendalian yang sudah diterapkan oleh UPK ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah UPK dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan/SPP sebagai penerima piutang dari UPK. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan *triangulasi* sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK adalah sitem tanggung renteng dengan sanksi lokal untuk menghindari kredit macet. Adapun untuk kolektibilitas piutangnya selama tiga tahun terakhir persentase untuk kategori kolektibilitas I/L : lancar sebesar 84,52% dengan rata-rata *nonperforming loan*/NPL sebesar 9%. Persentase ini menunjukkan bahwa piutang selama tiga tahun terakhir cukup baik dengan kolektibilitas kredit lancarnya 84,52 % dan NPL nya berada pada kategori risiko sedang/moderat dengan angka 9%. Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian piutangnya cukup efektif dengan kontribusi yang berhasil mereka capai sebagaimana tujuan dari PNPM-MPd.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Piutang, Kolektibilitas, *Nonperforming Loan*, dan Efektivitas.

**THE CREDIT CONTROL OF PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd) AT ASTAMBUL DISTRICT BANJAR REGENCY
SOUTH KALIMANTAN**

ABSTRACT

By WAHDIAH

The government made the policy to solve the destitution. One of them is the rural Independent society empowerment society national programme or in Indonesia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), it was founded by the 5th President Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono at April 30th 2007 in Palu central Sulawesi. A number of effort have tried to solve the empowerment problem, one of them that still exist until now is giving the credit by PNPM-MPd. It will be managed by activity manager unit or Unit Pengelola Kegiatan (UPK) so the aim in this research is to know and analysis how credit control actually that used by UPK. The research problem is ; (1) How credit control system that used by UPK ? (2) How the collectability at UPK ? (3) and how effectiveness of the credit control by UPK?

This research is field research with kualitatif deskriptif method, the subject in this research is UPK and the member of Simpan Pinjam Perempuan group (SPP Group) as the receiver of credit from UPK. In this research the data is collected by observasi, interview, and dokumentasi. The data analysis used triangulation technique it compare the data and information from different sources.

The result in this research shows that credit control system by UPK have relationship with local punishment it aim to avoid the bad credit. During three years ago, the credit collectability have presentase as I/L fluent 84, 52 % with the mean nonperforming loan / NPL at 9%. This presentase shows that the credit during three years is good, the collectability fluent 84,52 % mean while NPL is at moderat category with number 9%. Based on this data, the researcher concluded that credit control is effective to give the real contribution as PNPM-MPd aim.

Key word : Credit Control System, Collectability, Nonperforming Loan and Effectivity

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGENDALIAN PIUTANG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Jelita, M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Bapak Ali Sadikin, M.SI, sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Sadiani, MH, sebagai penguji utama dalam proses ujian skripsi saya yang memberikan arahan dan saran terbaiknya dalam skripsi saya.
8. Bapak M. Zainal Arifin, M. Hum, sebagai ketua sidang dalam proses ujian skripsi saya yang juga memberikan arahan terbaiknya dalam skripsi saya.
9. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI, yang telah memotivasi saya untuk menghadapi ujian skripsi dan seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
10. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis dan keselamatan selama menempuh pendidikan
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Maret 2017

Penulis

Wahdiah
Nim. 1302120227

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PENGENDALIAN PIUTANG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

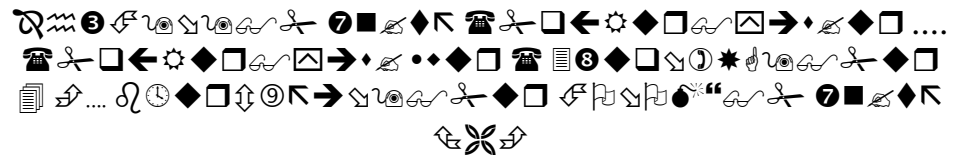
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2017

Penulis

Wahdiah
Nim. 1302120227

MOTTO



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

QS. AL-Maidah (5) : 2.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada

- ♥ *Untuk ayah saya Anang Zuhaiifah dan ibu saya Turfiah tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan harapan yang besar ayah dan ibu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah.*
- ♥ *Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.*
- ♥ *Semua dosen di Fakultas Ekonomi Islam yang telah selalu menginspirasi saya menjadi seseorang yang lebih baik dan memberikan wawasan selama menjalani perkuliahan.*
- ♥ *Teman-teman seperjuangan ESYA, B dan C dengan semua kenangan yang kita ukir selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Amin.*
- ♥ *Untuk kampus ku tercinta IAIN Palangka Raya, terima kasih.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em

ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
هـ	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	ā

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian	7
D.Batasan Masalah	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A.Penelitian Sebelumnya.....	10
B.Landasan Teori.....	13

1. Pemberdayaan Masyarakat	13
2. Program Bantuan Sosial (Bansos)	15
3. Pembiayaan dalam Islam	16
4. Konsep Dasar Utang Piutang.....	19
5. Kredit	28
6. Kolektibilitas Kredit atau Penggolongan Kualitas Kredit	33
7. Penanganan Kredit Macet atau Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>).....	35
8. Tingkat Keefektifitasan.....	39
9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	40
10. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)	42
C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Pengabsahan Data	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN	54
A. Sekilas Mengenai Lokasi Penelitian	54
B. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Unit Pengelola Kegiatan	56
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)	56
2. Unit Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).....	59

C.Deskripsi Penelitian	61
1. Sistem Pengendalian Piutang yang Diterapkan Oleh UPK kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan	61
2. Kolektibilitas Piutang pada UPK kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan	79
3. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Piutang Pada UPK Kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan	82
C.Analisis Penelitian	92
1. Sistem Pengendalian Piutang yang Diterapkan Oleh UPK Kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan	92
2. Kolektibilitas Piutang Pada UPK kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan	103
3. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Piutang Pada UPK kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan	117
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Indikator Perbedaan Penelitian	12
Tabel 2.Penggolongan Kolektibilitas.....	34
Tabel 3.Kolektibilitas Berdasarkan Jumlah Kelompok	79
Tabel 4.Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman	80
Tabel 5.Kolektibilitas Berdasarkan <i>Nonperforming Loan</i>	81
Tabel 6.Perkembangan Saldo Pinjaman	103
Tabel 7.Data Penggolongan Kolektibilitas	104
Tabel 8.Rasio Kolektibilitas Kredit Terhadap Total Kredit.....	108
Tabel 9.Data Kredit Nonperforming Loan.....	110
Tabel 10.Total Kredit Kategori KL,D dan M	111
Tabel 11.Hasil Perhitungan <i>Non Performing Loan</i>	112
Tabel 12.Analisa Data Kolektibilitas	113
Tabel 13.Pertumbuhan Asset	118

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Perbelanjaan Negara
APBD	: Anggaran Perbelanjaan Daerah
BOS	: Bantuan Oprasional Sekolah
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BAPS	: Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa
BKAD	: Badan Kerja Sama Antar Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
DJPLN	: Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara
IPTW	: Insentif Pembayaran Tepat Waktu
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAD	: Musyawarah Antar Desa
MPP	: Musyawrah Pendanaan Perguliran
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
PKH	: Program Keluarga Harapan
PUPN	: Urusan Piutang
PDT	: PNPM Daerah Tertinggal
PDM-DKE	: Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
PISEW	: PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
PNPM-Mandiri	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNPM MPd	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
PIIP	: PNPM Infrastruktur Perdesaan
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
P2DTK	: PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus
P3DT	: Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
P3MD	: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
RTM	: Rumah Tangga Miskin
SUNSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
SPP	: Simpan Pinjam Perempuan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UPK	: Unit Pengelola Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dan tentunya Indonesia menghadapi masalah kemiskinan yaitu suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang papan dan pangan. Secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan, kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Masalah kemiskinan yang kompleks menjadi penyebab munculnya masalah-masalah baru seperti, pendidikan, kelaparan, pengangguran, kesenjangan sosial, kesehatan terutama problem gizi buruk karena kurangnya asupan nutrisi dan juga peningkatan angka kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi melambat sementara pengangguran telah menjadi kronis dan problem jangka panjang.²

Permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan efek dari persoalan lain yang tidak mampu dibenahi dengan baik, seperti pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, kurang mempunyai pengelolaan sumber daya alam, kreatifitas masyarakat yang tidak

¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama, h. 2005, h. 143.

²M. Umar Captra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, h. 21.

𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽

³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *Syaamil Qur'an*, Bandung: Syaamil Quran. 2013, h. 259-260.

Jadi, masalah ekonomi sebenarnya tidak muncul akibat terbatasnya (sumber dan kekayaan) alam atau akibat ketidakmampuan alam dalam merespon kebutuhan manusia. Sesungguhnya masalah ekonomi dimunculkan oleh manusia itu sendiri, yakni dari kezaliman dan keingkaran mereka, sebagaimana dinyatakan dalam bagian akhir ayat diatas (*sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat*).⁴

Penanggulangan kemiskinan merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan organisasi sipil (LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Kegamaan, dan masyarakat miskin).⁵

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan bantuan sosial yang sangat strategis dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan fasilitas pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong percepatan pembangunan di daerah.⁶

Program pemberdayaan masyarakat didorong melalui strategi yang lebih realistis kepada target sasaran yaitu dengan diberlakukannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) mengenai peningkatan penanggulangan kemiskinan, kemudian diikuti dengan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa

⁴Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, h. 429-430.

⁵*Ibid.*, h. 55.

⁶Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan*, Bandung : Fokus Media, 2012, h. 77.

Tertinggal (P3DT), serta dipertajam dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada Tahun Anggaran 1998/1999.⁷

Pada masa krisis ekonomi Tahun 1998, program pemberdayaan masyarakat semakin digalakkan, yaitu dengan diluncurkannya kegiatan pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Namun hasilnya belum seluruh program pemberdayaan masyarakat tersebut berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.⁸

Salah satu program nasional yang keberadaannya benar-benar membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi terutama perekonomian mikro adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM).⁹ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau paket PNPM Mandiri merupakan salah satu implementasi prioritas nasional penanggulangan dan pencapaian target-target MDGs¹⁰. Program PNPM Mandiri telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-5 Bapak

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, h. 78-79.

⁹Admin, "Kementerian Dalam Negeri Gelar Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014." Diambil dari : <https://pnpmmandiriperdesaankulonprogo.wordpress.com/2014/06/09/kementerian-dalam-negeri-gelar-penghargaan-pemberdayaan-sikompak-2014/>. (Online : Jumat 23 Oktober 2015 Pukul 20:17 WIB).

¹⁰MDGs (*Millenium Development Goals*) : Sasaran Pembangunan Millenium, yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia oada Konferensi Tingkat Tinggi Mellenium di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sepetember 2000 dan dicanangkan oleh Sekretaris Jendral PBB pada tahun 2002. Termuat dalam bukunya Budi Sulisty, Jodie Perdanakusuma dan Ninok Ieksono, dengan judul *MDGs Sebentar Lagi*, Jakarta, PT Gramedia , 2010 .

Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007, di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.¹¹

Salah satu programnya adalah kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dibawah Unit Kegiatan Pengelola (UPK) yang berada di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kelompok SPP merupakan kelompok penerima modal pinjaman dari UPK yang dananya merupakan hibah dari pemerintah pusat. Kelompok SPP ini terdiri dari masyarakat miskin produktif yang bertujuan untuk membangkitkan jiwa *enterpreneurship* para perempuan khususnya para Ibu rumah tangga sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana pengamatan dan observasi peneliti pada informasi yang didapatkan pada tahun 2007 UPK di kecamatan Astambul telah menerima modal awal sebesar 300 juta Rupiah berupa hibah dari pemerintah pusat, dari modal tersebut dengan pengelolaan yang dilaksanakan pada laporan akhir tahun 2016 asset yang dimiliki oleh UPK melalui Kelompok SPP di kecamatan Astambul telah mencapai angka 1,8 Miliar. Suatu keberhasilan diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan, lembaga yang memberikan pinjaman atau pembiayaan tingkat keberhasilannya tidak lepas dari tata kelola piutang yang baik, yaitu dari kolektibilitas dan tingkat

¹¹Agung Laksono, *Menuju Indonesia Emas*, Jakarta : Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, h. 18.

keefektifitasan piutangnya yang menjamin keberlangsungan dari dana itu sendiri tetap bertahan dan berkelanjutan.¹²

Beranjak dari permasalahan diatas menarik bagi peneliti untuk melihat lebih detail bagaimana sebenarnya tata kelola piutang yang dilakukan oleh UPK pada PNPM Mandiri Perdesaan Astambul dalam hal pengendalian piutang yang telah mereka terapkan dengan melihat kolektibilitas piutangnya, atas dasar tersebut maka peneliti mengangkat sistem pengendalian piutang pada unit usaha kelompok simpan pinjam perempuan sebagai objek yang akan diteliti dengan judul **“Pengendalian Piutang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana kolektibilitas piutang pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?

¹²Observasi Awal dengan Ketua UPK via telphon

3. Bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang dicapai dalam makalah ini sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis kolektibilitas pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis efektivitas cara penerapan sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, data yang akan dianalisis oleh penulis adalah data kolektibilitas selama tiga tahun terakhir dari tahun 2014

s/d 2016 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat bagaimana pengendalian piutang yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kec. Astambul Kab. Banjar, dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian mikro sehingga dalam pengelolaan dananya sesuai dengan kebutuhan paling prioritas perdesaannya.

2. Kegunaan Teoritis

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam V Bab, yaitu :

BAB I, pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, kajian pustaka terdiri dari penelitian sebelumnya, landasan teori, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III, metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Pembahasan dan hasil penelitian, di dalam bab ini berisi pembahasan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V. Penutup, didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang dianggap perlu untuk diperhatikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Pada tahun 2015 sebuah Thesis mengenai PNPM pernah dilakukan sebelumnya oleh I Gusti Putu Putra seorang Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, dengan judul *Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Terhadap Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PNPM-MPd memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Abiansemal.¹³

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Nor Aida seorang mahasiswa Program S1 IAIN Antasari Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun 2015 dengan judul “*Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mpd terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.*” Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui efektivitas program SPP dan pengaruhnya terhadap peningkatan

¹³I Gusti Putu, “Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Terhadap Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung.” Diambil dari : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/viewFile/12357/9225>. (Online : Jumat 10 Juni 2016 Pukul 12:19 WIB).

kesejahteraan ekonomi anggota kelompok program SPP di Kecamatan Tatah Makmur.¹⁴

Pada tahun 2012 Anggraeny Retno Hayati seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin melakukan sebuah penelitian dengan judul *Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Sistem Pengendalian Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dan sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh perusahaan metode analisis yang digunakan yaitu Analisis *Receivable Turn Over* (RTO), *Avarage Collection Period* (ACP), *Rasio Penagihan* dan Rasio tunggakan.

Penelitian berikutnya yang ditemukan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Damianus Ding seorang mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, yang berjudul *Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMPd) di Desa Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu*.¹⁵ Penelitian ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan PNPM-MPd pada kegiatan Simpan

¹⁴Nor Aida seorang mahasiswa Program S1 IAIN Antasari Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan judul “Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mpd terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.” Diambil dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/618/1/SEMUA%20BAB.pdf>. (Online : Rabu 28 September 2016 Pukul 19:54 WIB).

¹⁵Damianus Ding, “Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.” [http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/08/jurnal%20Damianus%20Ding%20\(08-29-14-01-47-10\).pdf](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/08/jurnal%20Damianus%20Ding%20(08-29-14-01-47-10).pdf). (Online : Jumat 10 Juni 2016 Pukul 13:40 WIB).

Pinjam Perempuan (SPP) dan dibidang pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana di desa Boan.

Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bagaimana sistem pengendalian piutang pada PNPM-MPd di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. peneliti akan melihat lebih detail bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam hal pengendalian piutang yang telah mereka terapkan terkait dengan sistem pengendalian piutang yang diterapkan, tingkat keefektifitas dan standar kolektibilitas.

Tabel 1.Indikator Perbedaan

Nama	Indikator	
	Judul	Tujuan
Gusti Putu P.	<i>Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Terhadap Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung.</i>	Mengetahui pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Abiansemal
Anggraeny Retno Hayati	<i>Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Sistem Pengendalian Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar.</i>	Bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan dan sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh perusahaan Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Receivable Turn Over (RTO), Average Collection Period (ACP), Rasio Penagihan

		dan Rasio Tungga.
Damianus Ding	<i>Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMPd) di Desa Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.</i>	Mengetahui bagaimana pelaksanaan PNPM MPd pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan di bidang pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana di Desa Boan
Nor Aida	<i>“Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mpd terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.”</i>	Mengetahui bagaimana keefektifitasan program SPP dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok program SPP di Kecamatan Tatah Makmur
Wahdiah	<i>“Pengendalian Piutang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.”</i>	Mengetahui bagaimana sistem pengendalian piutang yang diterapkan dan mengamati bagaimana keefektifitasannya berdasarkan rasio perhitungan kolektibilitas piutangnya

B. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Pada prinsipnya, masyarakat

mengkaji tantangan pembangunan mereka, lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini.¹⁶

Mengingat pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang relatif baru, dibutuhkan perubahan perilaku dan sikap dari semua pihak terkait yang terlibat. Untuk memulai perubahan ini hendaknya dilakukan dalam skala kecil. Setelah memperoleh pengalaman dan manfaat yang jelas dari pendekatan ini maka penyebarluasannya secara lebih luas sudah bisa dimulai.¹⁷

Permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi adalah :

- a. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi.
- b. Kurangnya penciptaan akses masyarakat terhadap input sumber daya ekonomi berupa kapital, lokasi berusaha, lahan usaha, informasi pasar, dan teknologi produksi.
- c. Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingannya.¹⁸

¹⁶Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009, h. 136.

¹⁷*Ibid.*, h. 137.

¹⁸*Ibid.*, h. 75.

2. Program Bantuan Sosial (Bansos)

Kebijakan pemerintah bagaimanapun diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan. Dalam upaya tersebut, kemandirian masyarakat melalui peningkatan peran serta efisien dan produktivitas rakyat menjadi sebuah syarat yang mutlak. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁹

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Sifat bansos bisa dengan syarat atau tanpa syarat, diberikan melalui kementrian/lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara, tetap dan dapat berupa uang atau barang.²⁰

Pemanfaatan bansos berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu:

¹⁹Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002, h. 149.

²⁰*Ibid.*, h. 2.

- a. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa/Mahasiswa Miskin,
- b. Bidang kesehatan meliputi Program Jamkesmas di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kelas III,
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
- d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).²¹

Target sasaran penerima bansos berdasarkan data kemiskinan makro yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sunesnas). Adapun ciri-ciri penduduk miskin adalah penduduk yang mayoritas bekerja disektor pertanian, rata-rata jumlah anggota setiap rumah tangga adalah sekitar 5 jiwa/orang, rata-rata umur keluarga 47,3 tahun, rata-rata tingkat pendidikan adalah tamat sekolah dasar, dan rata-rata jumlah jam kerja relative pendek.²²

3. Pembiayaan dalam Islam

- a. Definisi pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan

²¹*Ibid.*,

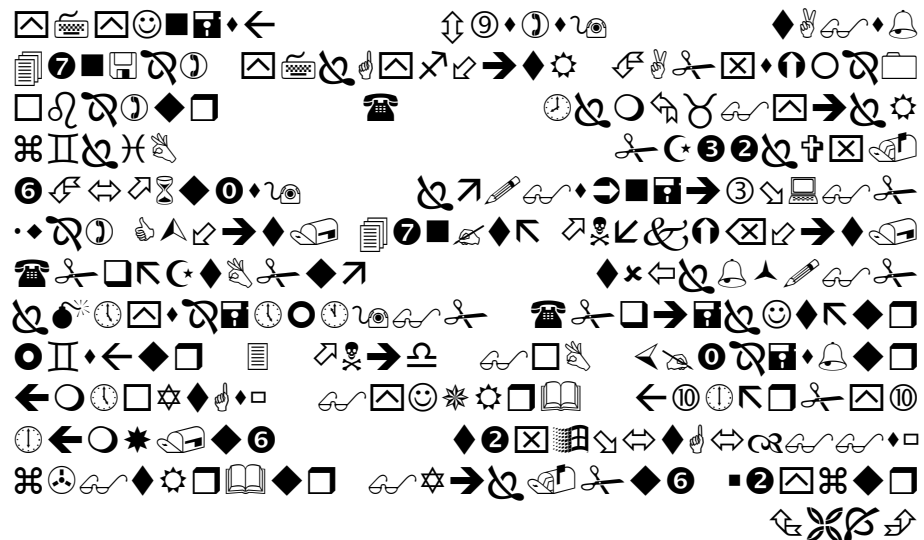
²²Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan...*, h. 3.

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan²³.

b. Landasan syariah

Firman Allah SWT dalam Qur'an surah As-Shad (38) ayat 24

sebagai berikut :



Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."²⁴

c. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan

²³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2007, h. 17.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, Syaamil Qur'an...*, h. 454.

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, tujuan pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadi distribusi pendapatan²⁵

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba
- 2) Upaya meminimalkan risiko
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana²⁶

d. Jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi :

- (a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- (b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

²⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h 17-18.

²⁶*Ibid.*, h. 18.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi :

- (a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- (b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.²⁷

4. Konsep Dasar Utang Piutang

a. Definisi utang piutang

Menurut Mulyadi dalam buku Hengki Irawan Setia Budi, “Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam siklus kegiatan perusahaan.”²⁸

Dalam pengertian luas, piutang merupakan segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.²⁹

Sedangkan menurut ahli fiqih pengertian utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan

²⁷ *Ibid.*, h. 22.

²⁸ Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang Smart In Account Receivable*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2011, h. 3

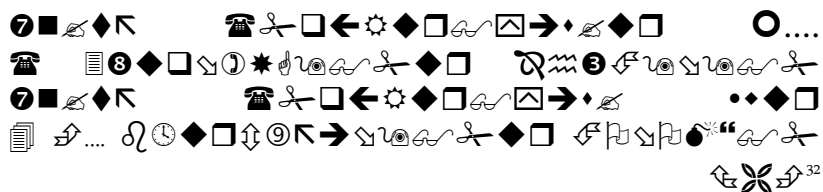
²⁹ Imam Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Bandung : PT Refika Aditama, h. 199.

uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang.³⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa baik piutang atau pinjaman memberikan manfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang menerima. Artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun transaksi kredit oleh perusahaan.³¹

b. Hukum utang piutang dalam Islam

Adapun yang menjadi dasar utang piutang dapat dilihat pada ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”³²

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً
(رواه ابن ماجه)

³⁰Admin, “Pengertian Hutang Piutang.” Diambil dari : <http://kafeilmu.com/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam/>. (Online : Sabtu 26 Maret 2016 Pukul 17:54 WIB).

³¹Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta : Kencana, 2010, h. 239.

³²QS Al-Maidah (5) ayat 2.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, Syaamil Qur'an...*, h. 106.

Artinya : “Seorang muslim yang mempiutang seorang muslim dua kali, seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali.”³⁴

Memberi utang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.³⁵

c. Jenis-jenis piutang

Piutang dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan terjadinya, yaitu piutang dagang dan piutang nondagang :

1. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan secara kredit barang dagangan, barang hasil produksi atau jasa yang dihasilkan.
2. Piutang nondagang adalah piutang yang timbul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan penjualan kredit, misalkan piutang kepada karyawan, piutang pendapatan bunga atau piutang kepada pemegang saham.³⁶

e. Pengendalian piutang

Sebagaimana diketahui, piutang merupakan salah satu bagian penting dalam harta lancar perusahaan. Oleh karena itu, tidak

³⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012, h. 307.

³⁵*Ibid.*

³⁶Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang...*, h. 3-4.

dapat dipungkiri bahwa pengendalian piutang merupakan suatu perangkat alat yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena piutang yang tidak dapat ditagih merupakan faktor yang akan merugikan perusahaan. Dengan kata lain resiko tidak tertagihnya piutang dari para langganan tetap, adalah tanggung jawab bersama di antara fungsionaris perusahaan.³⁷

Menurut Azhar Susanto (2004), pengendalian meliputi metode, kebijakan dan prosedur organisasi menjamin kekayaan keamanan harta perusahaan, ketelitian dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.³⁸

f. Utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata, menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁹

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian,

³⁷Nanang Budianas, "Pengendalian Piutang dan Metode." Diambil dari : <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/03/pengendalian-piutang-dan-metode.html>. (Online : Sabtu 26 Maret 2016 Pukul 17:45 WIB).

³⁸Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang...*, h. 37.

³⁹Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013, h. 9.

buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai belanja.⁴⁰

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.⁴¹

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata, mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjam uang, diatur dalam Bab ke-13 KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.⁴²

g. Istilah para pihak yang digunakan

Telah disebutkan bahwa dalam perjanjian utang piutang, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau

⁴⁰*Ibid.*, h 10.

⁴¹Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013, h.10.

⁴²*Ibid.*

kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman tersebut pihak yang berutang atau debitur.⁴³

h. Latar belakang terjadinya perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatar belakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain.⁴⁴

1) Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang.

2) Karena dilatarbelakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

i. Beberapa pertimbangan kreditur ketika akan memberi pinjaman

Kreditur dalam memberikan pinjaman uang kepada debitur, tentu tidak langsung begitu saja bersedia memenuhi permintaan debitur, sebelum memberikan kreditur pasti mempertimbangkan lebih

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*..., h. 11.

dahulu tentang beberapa hal dapat tidaknya permintaan itu dikabulkan.⁴⁵

1) Kreditur perorangan

Jika kreditur yang memberikan utang adalah perorangan, maka setidaknya orang yang meminta utang dipertimbangkan mengenai hal-hal yang menyangkut empat persoalan, yaitu tentang siapa orangnya, nilai utangnya, kekayaannya, dan kepentingannya. Dengan mempertimbangkan dengan seksama, kreditur mempunyai dasar yang kuat untuk dapat mengambil keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan uang.⁴⁶

2) Siapa orangnya

a) Kenal atau tidak

Jika ada orang datang meminta utang, seorang kreditur akan mempertimbangkan yang pertama-tama adalah apakah kenal orangnya atau tidak. Kalau tidak kenal, pada umumnya kreditur tidak mudah akan memberi utang. Banyak orang yang menganggap sebagai sesuatu yang aneh atau kurang/tidak lazim, orang yang tidak kenal tiba-tiba meminta dipinjam uang. Dalam praktik, kebanyakan orang tidak bersedia meminjam uang kepada orang yang tidak kenal.⁴⁷

b) Hubungannya

⁴⁵ *Ibid.*, h. 13.

⁴⁶ Supramono, *Perjanjian Utang Piutang...*, h. 13.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 14.

Pertimbangan berikutnya adalah bagaimana hubungannya selama ini, apakah baik atau tidak. Apakah hubungannya kurang/tidak baik, misalnya dahulu pernah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau sakit hati, biasanya kreditur tidak berkenan memberikan pinjaman.⁴⁸

c) Pekerjaannya

Di samping itu, perlu dipertimbangkan yang bersangkutan itu apa pekerjaannya atau apa jabatannya. Berbicara mengenai pekerjaan atau jabatan dalam hubungannya dengan penghasilan, karena penghasilan akan merupakan sumber pembayaran utang, jika permintaan utangnya dikabulkan. Semakin tinggi penghasilan debitur, kreditur merasa semakin percaya akan kemampuan debitur membayar untuk utangnya.⁴⁹

d) Nilai utangnya

Selanjutnya, dipertimbangkan tentang berapa besar nilai utang yang dimohon debitur. Besarnya nilai utang dipertimbangkan dengan menghubungkan kemampuan debitur mengembalikan utangnya, apakah penghasilannya cukup tidak untuk membayar angsuran setiap bulannya. Dilain pihak, besarnya utang yang diberikan oleh kreditur, juga

⁴⁸Supramono, *Perjanjian Utang Piutang...*, h. 15.

⁴⁹*Ibid.*,

dipertimbangkan dengan kemampuan finansial kreditur itu sendiri.⁵⁰

e) Kepentingannya

Kreditur perlu mempertimbangkan kepentingan debitur dalam memohon pinjaman uang, apakah tujuan debitur berutang? Kalau kepentingan untuk usaha yang akan menuai keuntungan dikemudian hari, akan berbeda pertimbangannya dengan utang untuk keperluan pesta perkawinan, rekreasi, membiayai pembangunan rumah yang sifatnya konsumtif, terlebih lagi jika utang untuk keperluan berjudi, berfoya-foya, pengadaan narkoba, lebih banyak kreditur sulit mempertimbangkannya. Pada prinsipnya, kreditur lebih senang jika pinjamannya digunakan untuk usaha yang menjanjikan mendatangkan keuntungan.⁵¹

j. Bentuk perjanjian utang piutang

1) Perjanjian lisan sifatnya sederhana

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya juga kecil.⁵²

⁵⁰*Ibid.*, h. 16.

⁵¹Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*..., h. 16 dan 17.

⁵²*Ibid.*, h. 17.

Kebanyakan perjanjian secara lisan dilakukan karena pihak merasa saling percaya. Kelemahannya, apabila debitur ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, apalagi berbalik menuduh pihak kreditur yang mengada-ada, akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan risiko uangnya hilang.⁵³

2) Perjanjian tertulis untuk kepetingan pembuktian

Perjanjian utang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa utang piutang. Perjanjian utang piutang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, yaitu para pihak membuat sendiri surat perjanjiannya dan ditandatangani bersama, biasanya mencantumkan pula tanda tangan saksi. Dapat pula perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris, dengan cara mereka datang ke kantor notaris dan mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian utang piutang.⁵⁴

5. Kredit

1. Definisi

Secara *ethimologis* istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang

⁵³Supramono, *Perjanjian Utang Piutang...*, h h. 17.

⁵⁴*Ibid.*, h. 18.

mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur yang diizinkan oleh bank atau badan lain.⁵⁵

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit adalah memberikan sejumlah uang atau suatu benda yang dapat dinilai dengan uang oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati bersama dan tagihan yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang diberikan.

2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsurnya yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita berbicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

⁵⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007, h. 57.

⁵⁶Kasim, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 112.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum diluncurkan.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet

pemberian suatu kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau kebangkrutannya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁵⁷

3. Jaminan kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan

⁵⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, h. 114-115.

yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaiknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan.⁵⁸

4. Jenis-jenis kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek.
- b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.
- c. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga

⁵⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, h. 123-124.

yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.⁵⁹

6. Kolektibilitas Kredit atau Penggolongan Kualitas Kredit

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut.

Menurut Ketentuan Bank Indonesia, Kolektibilitas atau *Collectability* adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi :

- a. Kredit lancar, yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik)
- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

⁵⁹Hermansyah , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia...*, h. 60-61.

- c. Kredit tidak lancar, yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha *approach* telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.
- d. Kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
- e. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.⁶⁰

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :⁶¹

Tabel 2. Penggolongan Kolektibilitas

Lama Tunggakan/DPD (Hari)	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber: Jurnal

⁶⁰Suci Andiani, Sunandar, Hetika, “Analisis Tingkat Perputaran Piutang Berdasarkan Kolektibilitas Kredit.”

⁶¹*Ibid.*

$$\text{Kredit Lancar} = \frac{\text{Lancar}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

erdasarkan penggolongan kredit diatas maka akan diketahui rasio kreditnya terhadap total kredit yang diberikan atau tingkat pengembalian kreditnya dengan menggunakan rumus:

Rumus diatas untuk mengetahui rasio kredit lancar maka total dari seluruh kredit yang tergolong kedalam kategori lancar, sedangkan untuk kategori lainnya juga digunakan rumus yang sama.⁶²

7. Penanganan Kredit Macet atau Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberitahuan kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat waktunya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu :

- a. Faktor intern bank,
 - 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
 - 2) Ada kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

⁶²Istiningsih, "Analisis Kolektibilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Purworejo Cabang Bayan." Diambil dari http://www.stierajawali.ac.id/artikel_jurnal/analisis-kolektibilitas-kredit-pada-pd-bpr-bkk-purworejo-cabang-bayan/. (online 27 Februari 2017 Pukul 21:25 WIB).

- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

b. Faktor eksternal bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - (a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - (b) debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
 - (c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- 2) Unsur ketidaksengajaan
 - (a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - (b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - (c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

(d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.⁶³

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *nonperforming loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui tahap perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dan dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrasi atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (BAPS).

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*resheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan

⁶³Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Praktek*,

penyelamatan kredit bermasalah melalui *resheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *resheduling*, dan/atau *reconditioning*.

Adapun mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa *restrukturisasi* tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap

(*inkracht van bewijs*), mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet.⁶⁴

Adapun analisis NPL (*Nonperforming Loan*), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{KL} + \text{D} + \text{M}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk penaksiran klasifikasi risiko kredit sebagai berikut :

- a. Risiko rendah (low) bila risiko kredit masih berada dibawah 5%.
- b. Risiko sedang (moderate) bila risiko kredit berada pada 5%-10%.
- c. Risiko tinggi (high) bila risiko kredit berada diatas 10%.⁶⁵

Adapun menurut ketentuan Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5 % jika melebihi maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.⁶⁶

8. Tingkat Keefektivitasan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris ; *Effective*, artinya berhasil; sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁶⁷ Secara sederhana

⁶⁴Hermansyah , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia...*, h. 77.

⁶⁵Hendra Salazaar,"Makalah Manajemen Risiko (Risiko Kredit/Credit Risk)." Diambil dari: <http://hendrasalazaar.blogspot.co.id/2016/03/makalah-manajemen-risiko-risiko.html>. (online 27 Februari 2017 Pukul 21:21 WIB).

⁶⁶Istiningsih, "Analisis Kolektibilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Purworejo Cabang Bayan."

efektivitas berasal dari akat efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna).⁶⁸ Jadi, efektivitas adalah keberhasilan suatu pertanggung jawaban terhadap tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, ketika kontribusi yang dihasilkan semakin mendekati sasaran tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Pemerintah telah mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga kedalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM-Mandiri juga merupakan instrument program untuk percepatan program MDGs sampai tahun 2015.⁶⁹

PNPM-Mandiri merupakan bantuan sosial dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, serta kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar terlepas dari tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidupnya, menciptakan kegiatan padat karya, menyerap tenaga kerja, menyediakan lapangan kerja sektoral, dan regional seperti menyiapkan sarana dan prasarana,

⁶⁷Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta : Indeks, 2013 h, 83.

⁶⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, h. 20.

⁶⁹Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Kencana, 2011, h. 832.

infrastruktur perdesaan, pemerintah daerah, kelembagaan dan organisasi masyarakat, transportasi, pertanian, kehutanan, air bersih dan pendidikan dan kesehatan.⁷⁰

PNPM-Mandiri dikelompokkan menjadi lima kegiatan, yaitu :

- a. PNPM-Mandiri Perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan)
- b. PNPM-Mandiri Perkotaan (Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)
- c. PPIP (Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan)
- d. P2DTK (PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus), serta
- e. PISEW (PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)⁷¹

Tujuan dari PNPM-Mandiri terdiri dari :

- a. Tujuan umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dan
- b. Tujuan khusus, yaitu terdiri :
 - 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan
 - 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representif dan akuntabel
 - 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,

⁷⁰Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan....*, h. 120-121.

⁷¹*Ibid.*, h. 83.

program penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)

- 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
- 5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan diwilayahnya
- 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal, dan
- 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.⁷²

10. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

Penerima pinjaman dari UPK adalah kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), maksud dari SPP sendiri adalah suatu kelompok penerima dana pinjaman dari UPK yang disalurkan lagi kepada setiap anggota kelompoknya masing-masing untuk mereka penggunaan sebaik mungkin. PNPM-MPd melalui UPK lebih menekankan pengembangan pemberdayaan

⁷²Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan...*, h. 87-88.

perempuan dalam menuntaskan kemiskinan demi tercapainya kemandirian yang berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu strategi untuk mempercepat tercapainya program pemberantasan kemiskinan. *Mellenium Development Goals* (MDGs) yang menempatkan kaum perempuan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan karena kaum perempuan berperan besar dalam mewujudkan atau menjalankan tatanan ekonomi dimasyarakat.⁷³ Oleh karena itulah penerima dari pinjaman ini hanya kaum Ibu-Ibu yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan.

Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari kelompok SPP sebagai berikut :

a) Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan Rumah Tangga Miskin/RTM.

b) Tujuan Khusus

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.

⁷³Dwidjo, "*Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Mikro*". Diambil dari : [http://www.hupelita .Com/ baca. Php?id=27383](http://www.hupelita.Com/baca.Php?id=27383).(Online : 04 Maret 2017 Pukul 20:37 WIB).

- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

c) Ketentuan Dasar

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2. Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
5. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁷⁴

Dalam prosedur perguliran dana program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menggunakan sistem tanggung renteng. Disebutkan dalam pasal 1278 KUH Perdata adalah “*Suatu perikatan tanggung menanggung*

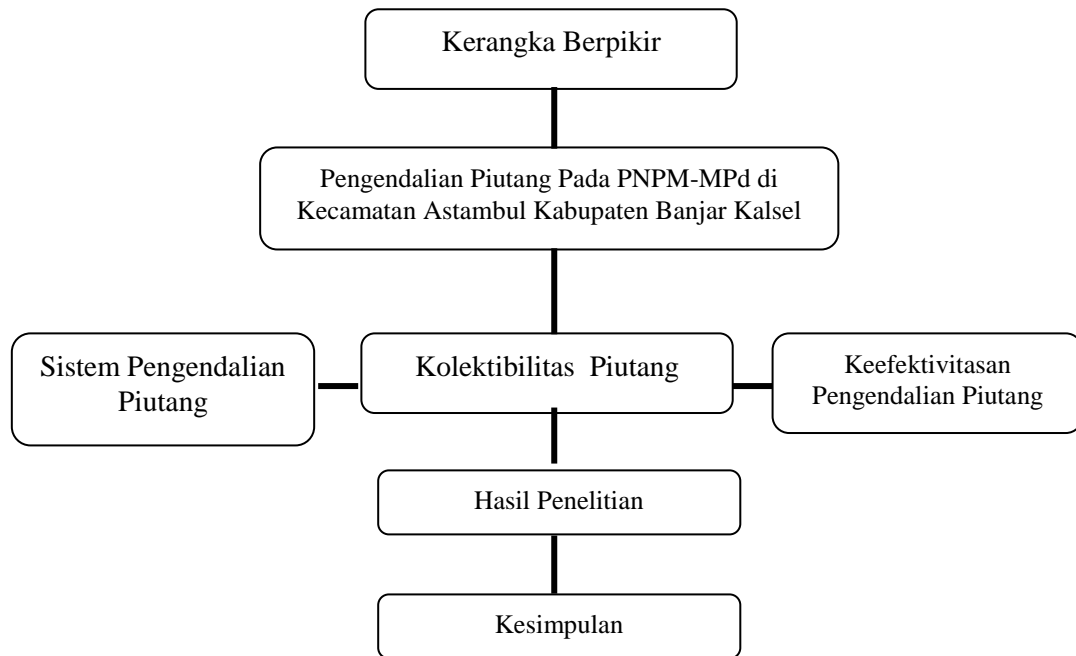
⁷⁴Muddin, “Peran Kelompok PNPM SPP.”

atau perkataan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika didalan persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara orang berpiutang.”⁷⁵

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Kemiskinan yaitu suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang papan dan pangan. Salah satu program pemerintah dalam memberantas kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang mana program ini mengikut sertakan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi melalui Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Dengan adanya program ini, telah membawa angin segar pada pertumbuhan ekonomi mikro di perdesaan. Piutang yang telah diberikan tentunya memerlukan perlakuan khusus untuk menjamin keberlangsungannya adapun yang menjadi alat demi menjamin hal tersebut adalah sistem pengendalian piutang. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya sistem pengendalian piutang yang diterapkan, bagaimana kolektibilitas piutangnya dan keefektivitasan sistem yang telah diterapkan? jadi, untuk mempermudah maksud peneliti maka digambarkan sebuah kerangka berfikir sebagai berikut :

⁷⁵Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradmya Paramita, 2003.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Burhan Ashdow, mengungkapkan bahwa deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diteliti. Maksudnya seorang peneliti harus dapat memahami serta menghayati apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.⁷⁶

Pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa yang ada sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁷⁷

Penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui dan menggambarkan bagaimana keadaan dilapangan pada saat penelitian mengenai pengendalian piutang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

⁷⁶Burhan Ashdow, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Bumi Aksara, 20014, h. 26.

⁷⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004, h. 26.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan setelah mendapatkan surat izin penelitian, dan lokasi penelitian telah dilakukan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai anggota dari penerima dana bergulir dan unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM-MPd di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek yaitu metode Purposive Sampling, dengan melihat kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Subjek yang tingkat kolektibilitasnya masuk kategori lancar
2. Subjek yang sudah menerima pinjaman dalam jangka waktu lama yaitu 10 tahun terhitung dari awal berdirinya PNPM-MPd dari tahun 2007 s/d 2017.
3. Subjek yang sudah menerima pinjaman dalam jangka waktu 3-4 tahun terakhir
4. Subjek yang baru bergabung paling lama 1 tahun
5. Subjek yang bersedia untuk diwawancarai

Untuk subjek dari UPK sendiri penulis mengambil semua anggota UPK yaitu terdiri dari 3 orang, ketua, sekertaris dan bendahara yang akan

diwawancarai dan dimintai data-data tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

Objek penelitian ini adalah sistem pengendalian piutang kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh UPK PNPM-MPd di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁷⁸ Menurut Lexy J. Moleong, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁹

Dalam hal ini penulis melakukan dialog secara langsung dengan subjek dari UPK dan kelompok SPP agar penulis dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian.

2. Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala

⁷⁸Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 29.

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h. 186.

psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸⁰ Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁸¹

Melalui tahap observasi ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terkait dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain, dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain.⁸²

Melalui tahap ini penulis akan mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan misalnya mengabadikan potret selama proses pengumpulan data, Profil UPK di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Standar Operasional dan

⁸⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, h. 63.

⁸¹Moh, Nasir, *Metode Penelitian*, Ciawi-Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005, h. 175.

⁸²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 82.

Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan Data Kelompok SPP terbaru.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi telah sesuai dan relevan dengan kenyataan sesungguhnya. Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* menurut Moelong adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁸³

Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁸⁴

Keabsahan data dari penelitian ini menjamin bahwa dalam mendeskripsikan tentang Pengendalian Piutang pada UPK di Kec. Astambul Kab. Banjar penulis memerlukan data yang jelas untuk keakuratan data yang akan diperoleh. Hal ini dapat ditempuh dengan membandingkan hasil pengamatan dan wawancara yaitu dengan membandingkan hasil obeservasi terkait dengan penelitian dengan data hasil wawancara.

⁸³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian....* h. 177.

⁸⁴*Ibid.*, h. 178.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁵

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁸⁶

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu :

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Reduction* data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan.
3. *Display* data atau penyajian data ialah data yang sudah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk laporan

⁸⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h, 89.

⁸⁶M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012, h. 245.

4. *Verification* atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya di peroleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁸⁷

⁸⁷Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemah oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta : Universitas Indonesia, 1992, h. 15-21.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Sekilas Mengenai Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd yang berada di kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Astambul adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Astambul terdiri dari 22 desa, yaitu :

1. Astambul Kota (pusat pemerintahan kecamatan)
2. Astambul Seberang
3. Banua Anyar Danau Salak
4. Banua Anyar Sungai Tuan
5. Danau Salak
6. Jati Baru
7. Kalampaian Tengah
8. Kelampaian Ulu
9. Kelampaian Ilir
10. Kaliukan
11. Limamar
12. Lok Gabang
13. Munggu Raya
14. Pasar Jati
15. Pematang Hambawang

16. Pingaran Ilir
17. Pingaran Ulu
18. Sungai Alat
19. Sungai Tuan Ulu
20. Sungai Tuan Ilir
21. Tambak Danau
22. Tambangan

Adapun Unit Pengelola Kegiatan yang berada di kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan berlokasi di Astambul kota dekat pasar Astambul dibelakang kantor kecamatan, UPK sudah berdiri sejak tahun 2007 dengan diluncurkan Program Nasional yaitu PNPM-Mandiri, ada pun tugas UPK adalah sebagai pengurus untuk mengelola sejumlah dana yang dihibahkan pemerintah melalui PNPM-Mandiri untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat. Pada awalnya UPK kec. Astambul bertempat di kantor Koramel, kemudian dipindahkan kerumah dinas kecamatan kurang lebih selama dua bulan, karena rumah dinas tersebut akan dipakai untuk kepentingan Bapak kepala camat, UPK sekarang sedang menyewa sebuah rumah warga sebagai kantor sementara, karena kantor UPK sendiri masih dalam proses pembangunan.⁸⁸

⁸⁸Berdasarkan hasil Observasi dengan pengurus UPK.

B. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Unit Pengelola Kegiatan

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

PNPM-MPd merupakan salah satu upaya untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja di Perdesaan, dengan mendorong kemandirian kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.⁸⁹ PNPM-MPd mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI Ke-5 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah.⁹⁰

PNPM-MPd dikelola oleh kementerian dalam negeri berdasarkan prinsip-prinsip yang bertumpu kepada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi kepada masyarakat, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparan dan akuntabel, berdasarkan prioritas dan keberlanjutan.⁹¹

Awal pelaksanaan PPK yang selanjutnya dikenal dengan PNPM-MPd dalam tahun 2005 merupakan salah satu kegiatan bantuan sosial bidang pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp 42,1 miliar, ditujukan untuk 30 Provinsi yang terdiri dari 245

⁸⁹Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan...*, h. 94.

⁹⁰Agung Laksono, *Menuju Indonesia Emas Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera...*, h. 73.

⁹¹Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan...*, h. 94.

Kabupaten/kota, dengan 1,592 kecamatan per desa. Kemudian dalam Tahun 2006, agar terjadi peningkatan kualitas kegiatan dan peningkatan manfaat kegiatan, maka target kepesertaan PNPM-MPd diturunkan hanya untuk 29 Provinsi terdiri dari 232 kabupaten, 1.144 kecamatan dan 18.007 desa.⁹²

Alokasi anggarannya berasal dari APBN 80 persen dan APBD 20 persen, dana jumlahnya ditingkatkan rata-rata antara sebesar Rp 0,5-1 miliar per kecamatan, dihitung berdasarkan dari jumlah penduduk, indeks kapasitas fiskal daerah, potensi daerah, dan tingkat kemiskinannya. Lokasi sasaran programnya ditujukan kepada kecamatan yang tidak masuk kategori bermasalah dalam PPK, kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan kontribusi dana APBD 20 % dan kecamatan yang tidak dialokasikan kegiatan PNPM-Perkotaan. Satu siklus kegiatan diperkirakan dapat dikerjakan selama lima tahun baru dapat menunjukkan keberhasilannya, selanjutnya ke depan kegiatan terus berlanjut secara mandiri.⁹³

Setiap penyaluran dana yang turun kemasyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan kepusat agar memudahkan penulusuran. Warga desa dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan ditingkat Kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta

⁹²Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan...*, h. 94.

⁹³*Ibid.*

peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.⁹⁴

Jenis kegiatan PNPM-MPd antara lain berupa pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana dasar bagi rumah tangga miskin, pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi dengan produksi berbasis sumber daya lokal dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Melalui PNPM-MPd diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahap pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian yang berkelanjutan.⁹⁵

Selanjutnya strategi PNPM-MPd adalah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan, bersinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dan bantuan pendampingan berupa *technical assistance*.

Ada beberapa hasil konkrit setelah program PNPM-Mandiri Perdesaan digulirkan ditengah masyarakat. Hasil konkrit itu antara lain kesempatan usaha diperluas dan muncul banyak lapangan kerja baru, adanya kenaikan belanja rumah tangga yang cukup signifikan, program ini sangat berpihak kepada orang miskin dan menciptakan kesetaraan gender,

⁹⁴Agung Laksono, *Menuju Indonesia Emas Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera...*, h. 77-78.

⁹⁵Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan...*, h. 95.

meningkatkan kapasitas, kinerja lokal, dan terbentuknya model perencanaan dan pembiayaan partisipatif.⁹⁶

2. Unit Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

Peran unit pengelola kegiatan (UPK) adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK mendapatkan penugasan melalui musyawarah antar desa (MAD) atau badan kerjasama antar desa (BKAD), untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana penguliran.⁹⁷

Berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tahun 2015 Visi dan Misi UPK adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya kelembagaan yang profesional dan mampu mengantarkan masyarakat untuk meraih kesejahteraan serta kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat.

⁹⁶Agung Laksono, *Menuju Indonesia Emas Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera...*, h. 80.

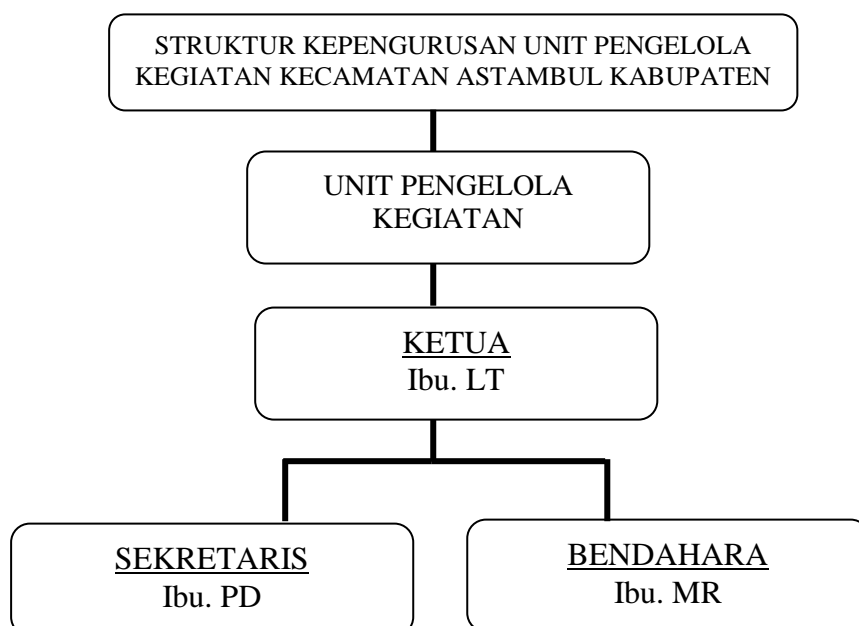
⁹⁷Muddin, "Peran Kelompok PNPM SPP." Diambil dari : <https://bahagiamuddin.wordpress.com/2013/02/09/peran-kelompok-spp-pnpm/>. (Online : 22 Oktober 2015 Pukul 07:31 WIB).

Misi :

- 1) Pelestarian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan
- 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana bergulir guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha, khususnya yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM).
- 3) Peningkatan kapasitas kelompok simpan pinjam dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dalam sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pengembangan jaringan kemitraan untuk mengembangkan usaha kelompok

Adapun struktur kepengurusan UPK di Kec. Astambul Kab.

Banjar adalah sebagai berikut :



C. Deskripsi Penelitian

1. Sistem Pengendalian Piutang yang Diterapkan Oleh UPK kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Piutang merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah perusahaan, bank ataupun juga lembaga non-bank, maka dari itu pengendalian piutang dijadikan sebagai suatu alat yang harus dijalankan seefektif mungkin demi menjamin keberlangsungan piutangnya, piutang diberikan dalam periode waktu tertentu, semakin lama waktunya maka akan semakin besar risiko piutang tak tertagihnya, dan tentunya dapat merugikan pihak yang memberikan piutang. Pengendalian piutang sekurang-kurangnya dimulai sebelum piutang diberikan seperti pengajuan piutang, persetujuan piutang, pencairan dan pengembalian piutang.

Dengan demikian maksud dari pertanyaan diatas adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK, bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan piutang, bagaimana mekanisme penyaluran dan pembayaran angsuran yang diterapkan dan tindakan apa yang dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi resiko kredit macet. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan 3 subjek dari pengurus UPK. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

Subjek UPK 1

Nama Subjek : Ibu LT

Jabatan : Ketua UPK

Umur : 28 Tahun

Pendidikan Terakhir : Sarjana Ekonomi

Penuturan subjek UPK 1:

“Sistem piutang yang kami terapkan yaitu sistem tanggung renteng dengan dana bergulir, maksud tanggung renteng itu piutang diberikan secara berkelompok, dimana setiap kelompoknya terdapat ketua, sekertaris dan bendahara. Kemudian untuk pencairan dananya akan diberikan kepada ketua kelompok yang kemudian dicairkan lagi ke anggota kelompok, untuk pembayaran angsurannya diserahkan kepada ketua kelompok baru kemudian dibayarkan lagi ke kami, setelah pembayaran sudah dilunasi maka dana akan digulirkan lagi kekelompok lainnya, dengan sistem tanggung renteng ini apabila ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar tepat waktu maka pembayaran akan ditanggung oleh semua anggota, untuk menghindari terjadinya penunggakan bayar ke kami. Nah, untuk besar pinjaman awal maksimal 2 juta, untuk memudahkan kami dan kelompok dalam mengkoordinir serta menghindari kredit macet. Kemudian untuk masa pinjaman yang kami terapkan hanya selama satu tahun untuk sekali pencairan dana dan angsurannya perbulan, tapi bila ada kelompok yang sudah melunasi hutangnya yang ingin meminjam lagi maka bisa mengajukan proposal kembali dan akan mengikuti prosedur peminjaman seperti prosedur awal.”⁹⁸

Subjek UPK 2

Nama Subjek : Ibu PD

Jabatan : Sekertaris UPK

Umur : 27 Tahun

Pendidikan Terakhir : Sarjana Pendidikan Islam

⁹⁸Wawancara dengan subjek UPK 1 pada tanggal 13 Februari 2017.

Penuturan subjek UPK 2 :

“Hutangnya tanggung renteng, hutang ditanggung bersama dengan dikordinir oleh ketua dari setiap kelompok, jadi bila ada anggota yang menunggak angsuran akan dibayarkan sementara oleh kelompok.”⁹⁹

Subjek UPK 3

Nama Subjek : MR

Jabatan : Ketua UPK

Umur : 25 Tahun

Pendidikan Terakhir : Sarjana Ekonomi

Penuturan subjek UPK 3 :

“Iya sistemnya tanggung renteng oleh kelompok SPP jadi hutang ditanggung oleh semua anggotanya, pembayaran angsurannya diserahkan ke ketuanya, jadi setelah terkumpul semua angsuran dari anggota barulah akan disetor kepada UPK, jika ada yang tidak bisa membayar maka akan ditanggung oleh kelompok, jadi sistem ini memberikan kemudahan tidak memberatkan yang berhutang.”¹⁰⁰

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi, pertanyaan kembali penulis ajukan kepada pengurus inti UPK. Adapun penuturan jawabannya sebagai berikut :

Penuturan subjek UPK 1 :

“Untuk syarat khususnya sebenarnya mudah, pinjaman yang kami berikan tanpa jaminan, kelompok cukup mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen usulan pengajuan pinjaman yaitu, daftar calon nama penerima dana, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat persetujuan

⁹⁹Wawancara dengan subjek UPK 2 pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁰⁰Wawancara dengan subjek UPK 3 pada tanggal 13 Februari 2017.

dari keluarga. Penerima harus dalam bentuk kelompok, satu kelompok minimal terdiri dari 6 anggota dan maksimal 25 anggota, tetapi untuk memudahkan kami dan kelompok juga dalam mengkordinir angsuran maka kami biasanya menyarankan agar dalam satu kelompok tidak terlalu banyak memiliki anggota sehingga kelompok dapat dengan mudah dibina dan pembayaran angsuran dapat dikelola dengan baik.”¹⁰¹

Penuturan subjek UPK 2 :

“Pastinya ada, persyaratan menurut saya sih mudah, cuma harus membentuk kelompok dulu, baru mengajukan proposal kelompok dengan menyertakan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan izin dari keluarga pemohon.”¹⁰²

Penuturan subjek UPK 3 :

“Syaratnya dengan mengajukan proposal yang sudah di acc pembakal, fotocopy KTP, KK dan surat persetujuan dari suami, menurut saya tidak begitu sulit dibandingkan dengan persyaratan dilembaga lain.”¹⁰³

Wawancara tidak berhenti sampai disitu saja setelah mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan dan persyaratan apa saja yang dipenuhi oleh kelompok peminjam, penulis juga menanyakan tentang mekanisme penyaluran dan pembayaran angsuran kepada ketiga subjek yang sama, sebagai berikut :

Penuturan subjek UPK 1 :

“Kalo masalah itu lebih jelasnya ada didalam SOP.”¹⁰⁴

Dikarenakan pada saat wawancara subjek UPK 1 sedang sibuk penulis tidak berpanjang lebar dengan pertanyaan, namun subjek UPK 1 memberikan naskah Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit

¹⁰¹Wawancara dengan subjek UPK 1 pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁰²Wawancara dengan subjek UPK 2 pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁰³Wawancara dengan subjek UPK 3 pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁰⁴Wawancara dengan subjek UPK 1 pada tanggal 13 Februari 2017.

Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, didalam SOP tersebut dijelaskan mengenai mekanisme perguliran dana dan pengembalian dana.

Penuturan subjek UPK 2 :

“Untuk penyalurannya singkat saja ya, pada awalnya harus membentuk kelompok dulu misalnya 6-8 anggota dalam satu kelompok, setelah itu pengajuan proposal dan berkas lainnya, baru diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu baru jika disetujui oleh tim maka akan dicairkan dananya. Kalo untuk pengembaliannya dikordinir oleh ketua kelompoknya sendiri.”¹⁰⁵

Penuturan subjek UPK 3 :

“Pertama-tama kelompok mengajukan proposal atas persetujuan oleh kepala desa, kemudian diperiksa kelengkapannya oleh kami sediri seperti kelengkapan KTP, KK dan nama-nama anggotanya, untuk memastikan anggotanya bukan fiktif. Tahap berikutnya kami akan turun ke desa untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok yang mengajukan proposal bersama tim verifikasi, setelah itu kami akan mengadakan pertemuan lagi dengan tim verifikasi dan tim validasi untuk mengadakan MPP, MPP itu Musyawarah Pendanaan Perguliran, baru lah tim validasi yang akan mengadakan pertemuan kembali dengan kelompok didampingi oleh UPK dan tim pendanaan, baru kelihatan apakah kelompok ini layak apa tidak untuk diberikan pinjaman dengan memastikan kepastian usaha yang akan dijalankan, jadi dana disalurkan apa tidaknya diputuskan pada tahapan ini, nah kurang lebihnya seperti itu, kalo pembayaran iuran dibayar dulu oleh anggota ke ketuanya, jadi ketuanya yang menyetorkan ke UPK.”¹⁰⁶

Setelah mengetahui mekanisme penyaluran dan pengembalian dana maka peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara penanganan kredit macet, wawancaranya sebagai berikut :

¹⁰⁵Wawancara dengan subjek UPK 2 pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁰⁶Wawancara dengan subjek UPK 3 pada tanggal 13 Februari 2017.

Penuturan subjek UPK 1 :

“Caranya iya dengan sistem tanggung renteng tadi, bila ada anggota yang tidak dapat membayarkan pinjamannya, maka akan menjadi tanggung jawab bersama, masalah ini juga sudah ada didalam SOP Perguliran, setiap kelompok yang kreditnya bermasalah akan berdampak pada kelompok lain di desa yang sama, bila kelompok bermasalah tidak menyelesaikan hutangnya maka pencairan didesa itu untuk periode selanjutnya tidak bisa dilakukan, jadi bila ada tunggakan ataupun penyalahgunaan akan diselesaikan dulu secara kekeluargaan, tapi bila tidak bisa ditangani maka akan kami tempuh jalur hukum dan bagi anggota terkait tidak akan diizinkan untuk mengajukan pinjaman lagi.”¹⁰⁷

Penuturan subjek UPK 2

“Masalah ini yang pastinya kami akan melakukan penagihan ke Ibu-Ibu yang menunggak pembayaran, lewat telphon atau langsung kerumah oleh tim penagih pembayaran yang tertunggak.”¹⁰⁸

Penuturan subjek UPK 3

“Kalo ada yang telat membayar misalnya sampai berbulan-bulan, kami beri teguran, terus turun tangan langsung menemui kelompok yang bersangkutan, jadi akan kami cari tahu terlebih dahulu kenapa bisa terjadi tunggakan, kemudian tindakan pertama yang akan diambil adalah musyawarah secara kekeluargaan, bila yang bersangkutan tidak mampu membayar maka akan ditanggung oleh semua kelompok, kemudian jika yang bersangkutan setelah dilakukan penyelidikan melalui ketua kelompok, ketua RT, warga sekitar atau pun keluarga yang bersangkutan ternyata mampu membayarkan tetapi sengaja tidak membayarkan maka UPK akan menempuh jalur hukum, begitu juga jika terjadi penyalahgunaan dana baik itu oleh ketua kelompok maupun UPK sendiri.”¹⁰⁹

Berdasarkan dari 4 wawancara diatas dengan 3 subjek dari UPK sistem pengendalian piutang yang diterapkan di UPK Kec. Astambul

¹⁰⁷Wawancara dengan subjek UPK 1 pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁰⁸Wawancara dengan subjek UPK 2 pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁰⁹Wawancara dengan subjek UPK 3 pada tanggal 13 Februari 2017.

adalah tanggung renteng yang telah disepakati dengan bukti surat pernyataan tanggung renteng yang dilampirkan pada proposal pengajuan pinjaman. Dengan adanya sistem ini akan mengurangi resiko pengembalian macet atau kredit macet karena tunggakan anggota akan ditanggung bersama agar pembayaran iuran sesuai dengan tagihan dan tepat waktu. Adapun dana yang disalurkan merupakan dana bergulir sehingga dana tersebut akan terus berputar dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Selain itu juga penulis menanyakan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh para kelompok SPP, jadi berdasarkan wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa syarat untuk mendapatkan pinjaman sangat mudah, pinjaman yang diberikan tanpa jaminan, dengan syarat penerima pinjaman harus membentuk kelompok, kemudian mengajukan proposal dengan persetujuan kepala desa dan melampirkan dokumen usulan pengajuan pinjaman yaitu, daftar calon nama penerima dana, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, surat pernyataan tanggung renteng dan surat persetujuan dari suami atau keluarga.

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis mengetahui bahwa untuk mekanisme proses pemberian piutangnya dari pengajuan piutang, persetujuan, penyaluran hingga pengembaliannya, prosedurnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan mudah. Piutang yang diberikan oleh UPK adalah dana bergulir dengan atas dasar kepercayaan, biasa disebut juga

dengan dana amanah. Oleh karena itu, rentan terhadap adanya penyelewengan. Maka dari itu harus ada penanganan untuk menghindari dan mengatasi masalah pengembalian/kredit macet, berdasarkan wawancara ada beberapa tahapan yang dilakukan pertama-tama UPK akan melakukan penagihan baik itu secara langsung maupun melalui via telphon untuk memberikan teguran, tahap selanjutnya UPK kelompok terkait akan mengadakan pertemuan dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, jika dengan cara tersebut masih belum bisa teratasi maka akan ditempuh jalur hukum.

Jadi, sistem yang diterapkan dalam persyaratan pengajuan piutang, persetujuan maupun mekanisme penyaluran dan pengembaliannya semua telah diatur sedemikian rupa dengan sistem tanggung renteng dengan maksud untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman yang akan digunakan sebagai modal usaha.

Kemudian untuk memperkuat hasil dari penelitian penulis juga melakukan wawancara dengan 9 orang perwakilan dari setiap kelompok simpan pinjam perempuan. Wawancara yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui dari mana para kelompok SPP mengetahui adanya UPK di Kec. Astambul, sistem pengendalian piutang seperti apa yang diterapkan oleh UPK, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan piutang, bagaimana mekanisme penyaluran dan pengembalian piutang dan bagaimana cara mengurangi resiko kredit macet serta cara penyelesaiannya. Adapun hasil wawancara dapat diuraikan dibawah ini.

a) Subjek SPP 1

Nama : NH

Nama Kelompok : Bunga Tanjung

Desa : Kalampayan Tengah

Pekerjaan : Penjual Kembang Goyang

Ibu NH adalah istri dari ketua RT di Kelampaian Tengah, beliau adalah ketua kelompok SPP dari kelompok Bunga Tanjung.

Penuturan subjek SPP 1 Ibu NH :

“Tahu adanya UPK inikan awalnya ini Program Pemerintah PNPM-Mandiri tahun 2007 Program SBY, lalu kami meulah kelompok penerima pinjaman dana program itu tadi. Piutang yang diberi buhannya sistemnya tu tanggung renteng, ada diperjanjian awalnya. Kalo persyaratannya sangat-sangat mudah, kayakan ada KTP, KK yang bersangkutan, imbah tu pertamakan di verifikasi lawan divalidasi, imbah tu hanyar pencairan. Nah, dana cair bila syaratnya lengkap lawan diacc oleh buhannya, amun pembayarannya diurus oleh aku sendiri ketua kelompoknya yang mengumpulkan tagihan dari anggota, hanyar aku yang membayarakannya lagi ke UPKnya. Tarus amun ada yang kada kawa bayar dipanderakan ja, kami tanggungan hutangnya dulu, kada kami pinjami lagi, kan ada sudah perjanjian awal apabila ada tunggakan ditanggung bersama, jadi, alhamdulillah kami ni di desa Kelampaian aman haja dan terkendali.”¹¹⁰

Terjemahan :

“Berawal dari Program Pemerintah yaitu PNPM Mandiri tahun 2007 yang merupakan program Presiden SBY. Setelah itu barulah kami membentuk kelompok penerima dana pinjaman dari program tersebut. Piutang yang diberikan oleh mereka sistemnya itu tanggung renteng dengan perjanjian diawal, untuk persyaratannya sangat-sangat mudah, seperti KTP, KK yang bersangkutan, kemudian akan diverifikasi dan divalidasi, setelah itu

¹¹⁰Wawancara dengan subjek SPP 1Ibu NH pada tanggal 14 Februari 2017.

barulah pencairan. Nah, dana akan dicairkan bila syaratnya lengkap dan disetujui oleh mereka, untuk pembayarannya dikelola oleh saya sendiri sebagai ketua kelompoknya, yang mengumpulkan tagihan dari anggota, baru saya yang membayarkan ke UPK. Terus bila ada yang tidak bisa membayar dibicarakan saja, kami tanggung hutangnya sementara, tetapi tidak akan kami pinjamkan lagi, sesuai perjanjian awal apabila ada tunggakan ditanggung bersama, jadi alhamdulillah kami ini di desa Kelampaian aman saja dan terkendali.”

b) Subjek SPP 2

Nama : RH

Nama Kelompok : Kakamban Habang

Desa : Limamar

Pekerjaan : Bandar kerajinan Manik dan Kredit Pakaian

Ibu RH adalah istri dari ketua RT Desa Limamar beliau juga sebagai ketua kelompok SPP di desa Limamar, usaha yang sudah beliau jalankan adalah pengusaha kerajinan tangan yang terbuat dari manik-manik dimana beliau adalah bandar sedangkan yang mengerjakannya adalah para Ibu-Ibu dan remaja-remaja dilingkungan sekitar, selain itu beliau juga mengkreditkan pakaian sebagai tambahan pendapatan.

Penuturan subjek SPP 2 Ibu RH :

“Dulu tu dari pemerintah, diadakannya Simpan Pinjam Perempuan. Hutang lawan buhannya tu tanggung renteng dengan persyaratannya kaya fotocopy KTP, KK lawan harus dapat izin lakinya supaya kalo ada apa-apa lakinya bisa tanggung jawab, habis itu baru pencairan dananya oleh buhannya UPK menyerahkan baru dibagikan ke anggota, membayarnya tu sebulan sekali ke UPK. Bila ada yang

macet tagihannya kan ada tanggung renteng, jadi hutangnya yang menunggak dibayarkan kelompok dulu.”¹¹¹

Terjemahan :

“Dulu itu dari pemerintah, diadakannya Simpan Pinjam Perempuan. Hutang dengan mereka itu tanggung renteng dengan persyaratannya seperti fotocopy KTP, KK dan harus mendapatkan izin dari suami, agar bila terjadi hal yang tidak diinginkan suaminya bisa bertanggungjawab, setelah itu barulah pencairan dananya oleh mereka UPK yang menyerahkan, baru dibagikan keanggota, membayarnya sebulan sekali ke UPK. Bila ada tagihan yang macet dengan adanya tanggung renteng jadi hutang yang menunggak akan dibayarkan oleh kelompok terlebih dahulu.”

c) Subjek SPP 3

Nama : SA

Nama Kelompok : Anggrek

Desa : Kalampayan Hilir

Pekerjaan : Pedagang Sembako dan Musimam

Penuturan subjek SPP 3 Ibu SA :

“Kami diundang awalnya ke balai desa, disitu dipadahkan ada pemberian pinjaman dengan meulah kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Hutangnya barenteng. Pencairannya buhannya datang menjulung dananya amunnya sudah disetujuinya, membayarnya dikumpulkan dulu baru disetor ke UPK. Kalo masalah persyaratannya tu kaya KTP, KK lawan jua keterangan usaha nya napa, jadi kena dilihat buhannya usahanya tu, bujur kadanya. Bila ada anggota yang kada kawa bayar ya tanggung renteng itu tadi dibayarkan kelompok dulu, kaya itu ai.”¹¹²

Terjemahan :

“Awalnya kami diundang ke balai desa, disitu diumumkan adanya pemberian pinjaman dengan membentuk kelompok

¹¹¹Wawancara dengan subjek SPP 2 Ibu RH pada tanggal 14 Februari 2017.

¹¹²Wawancara dengan subjek SPP 3 Ibu SA pada tanggal 14 Februari 2017.

Simpan Pinjam. Hutangnya dengan tanggung renteng. Pencairannya oleh mereka dengan datang menyerahkan dananya apabila sudah disetujui, membayarnya dikumpulkan terlebih dahulu baru kemudian disetorkan ke UPK. Kalau masalah persyaratannya itu seperti KTP, KK dan juga keterangan usahanya apa, jadi nanti akan dilihat oleh mereka usahanya tersebut, benar apa tidaknya. Bila ada anggota yang tidak bisa membayar ya dengan tanggung renteng itu tadi dibayarkan kelompok terlebih dahulu, seperti itulah.”

d) Subjek SPP 4

Nama : IS

Nama Kelompok : Pandan Sari

Desa : Kaliukan

Pekerjaan : Pemilik Usaha Roti

Penuturan subjek SPP 4 Ibu IS

“Aku rancak ke Kecamatan beurusan jadi imbahnya tahu ai ada SPP dengan hutangnya itu tanggung renteng, jadi semuanya bertanggung jawab bila ada yang kada kawa membayar. Tahapnya tu pertama meulah proposal dulu, baru ada pertemuan bila sudah disetujui dikabari, baru UPK membagikan duitnya, imbah tu setornya sebulan sekali. Kalo syaratnya biasa ai, maulah permohonan lawan berkas kaya fotocopy KTP lawan KK. Habis tu bila ada yang macet jadi lawan tanggung renteng tadi, jadi selambat-lambatnya bayar tapi sudah kami ditapali badahulu.”¹¹³

Terjemahan :

“Aku sering ke Kecamatan ada keperluan, jadi kemudian tahu ada SPP dengan hutangnya itu tanggung renteng, jadi semuanya bertanggung jawab apabila ada yang tidak bisa membayar. Tahapannya yang pertama membuat proposal terlebih dahulu, kemudian diadakan pertemuan apabila sudah disetujui baru dikabarkan, lalu UPK akan membagikan duitnya, kemudian disetorkan sebulan sekali. Kalau syaratnya biasa saja, membuat permohonan proposal

¹¹³Wawancara dengan subjek SPP 4 Ibu IS pada tanggal 15 Februari 2017.

dengan berkas seperti fotocopy KTP dan KK. Kemudian bila ada yang macet maka diselesaikan dengan tanggung renteng tadi, jadi selambat-lambatnya bayar tetapi sudah kami tutupi terlebih dahulu.”

e) Subjek SPP 5

Nama : AL

Nama Kelompok : Berkat Usaha

Desa : Sungai Tuan Ulu

Pekerjaan : Usaha Salon

Penuturan subjek SPP 5 Ibu AL :

“Dari kawan, aku ni kan rancak disuruh buhan rentenir kawan jua menawarkan supaya buhannya minjam ke rentenir tuh, cuma aku lihat-lihat kasian buhannya, menyulitkan banar mun minjam direntenir, kasian jua urang kan parlu duit, jadi aku BBM lawan Pardah di tawarkan lalu inya nah ke UPK, jadi aku ni nang membawai maulah kelompok SPP dari pada ke rentenir baik bausaha sorangan aku mauruskannya. Nah, nyamannya itu sistemnya berenteng, bila ada yang kada bisa bayar dibayarkan kelompok dulu. Syaratnya gin kada ngalih misalnya KTP dan KK yang pastinya izin suami, kalo dikelompok aku berhadapan langsung dengan suaminya jadi bila pertemuan terakhir sebelum pemberian dana itu suami harus ikut, karena sebagai jaminan apabila istrinya ada masalah jadi dengan sepengetahuan suaminya ada yang bisa mempertanggung jawabkan. Pencairannya tu bila sudah disetujui proposal pengajuan hutangnya tadi, hanyar UPK memberi pinjaman sejuta ja di awal, kena bila lancar kawa labih, tagihannya dikumpulkan dulu semua anggotanya, baru disetorkan ke UPK. Bila ada yang kada bayar kami disini aku langsung mendatangi buhannya untuk menagih pembayaran angsurannya, amunnya dasar kada kawa membayar kami talangi dulu tapi rajin selambat-lambatnya bayar ja.”¹¹⁴

¹¹⁴Wawancara dengan subjek SPP 5 Ibu AL pada tanggal 15 Februari 2017.

Terjemahan :

“Dari teman, aku sering disuruh oleh mereka rentenir yang teman juga, untuk menawarkan agar mereka meminjam kerentenir tersebut, tetapi aku lihat-lihat kasian mereka, menyulitkan sekali bila meminjam direntenir, kasihan mereka yang perlu duit, jadi aku yang BBM dengan Pardah yang kemudian dia menawarkan untuk ke UPK, jadi aku yang mengajak untuk membentuk kelompok SPP dari pada kerentenir, lebih baik berusaha sendiri dengan aku pengurusnya. Nah, yang mudahnya itu sistemnya renteng, bila ada yang tidak bisa membayar dibayarkan kelompok terlebih dahulu. Syaratnya juga mudah seperti KTP dan KK yang pastinya izin suami, kalo dikelompok aku berhadapan langsung dengan suaminya jadi bila pertemuan terakhir sebelum pemberian dana itu suami harus ikut, karena sebagai jaminan apabila istrinya ada masalah jasi dengan sepengetahuan suaminya ada yang bisa mempertanggung jawabkan. Pencairannya itu apabila proposal yang diajukan sudah mendapat persetujuan barulah UPK memberikan pinjaman sejuta saja diawal nanti apabila lancar bisa lebih, tagihannya dikumpulkan terlebih dulu semua anggotanya, baru disetorkan ke UPK. Kami disini aku yang langsung mendatangi mereka untuk menagih pembayaran angsurannya, bila memang tidak bisa membayar akan kami tutupi dulu tapi biasanya selambat-lambatnya pasti bayar.

f) Subjek SPP 6

Nama : HL

Nama Kelompok : Thalalabul Gufran

Desa : Sungai Tuan Hilir

Pekerjaan : Jual Pulsa

Penuturan subjek SPP 6 Ibu HL :

“Kami tahu adanya UPK dari pembakal lawan kader PNPM bekerjasama dengan UPK. Sistemnya tu tanggung dengan syarat pertama membuat proposal dengan melengkapi berkas lain kaya KTP, KK dan surat Izin suami dan membentuk kelompok, nah habis itu baru bisa disalurkan olehnya kan tanggung renteng, jadi membayar tagihannya

dikumpulkan jua diketua baru pas tanggal tagihan dibayarkan ke UPK. Terus bila ada yang macet begini, khusus dikelompok kami sudah ada perjanjian awal, bila inya menunda pembayaran ada sanksinya yaitu denda Rp. 50 perharinya, kami juga terkadang melakukan penagihannya perminggu, jadi setelah satu bulan baru kami setorkan ke UPK, jadi kelompok membayarnya sedikit ringan karena perminggu.”¹¹⁵

Terjemahan :

“Kami mengetahui adanya UPK dari pembakal dan kader PNPM bekerjasama dengan UPK. Sitemnya itu tanggung renteng dengan syarat pertama membuat proposal dengan melengkapi berkas lain seperti KTP, KK dan surat izin dari suami dan membentuk kelompok dulu baru bisa disalurkan karena ada tanggung renteng, jadi membayar tagihannya dikumpulkan juga diketua baru ketika tanggal tagihan dibayarkan ke UPK. Kemudian bila ada yang macet begini, khusus dikelompok kami sudah ada perjanjian awal, bila ada yang menunda pembayaran ada sanksinya yaitu denda Rp. 50 perharinya, kami juga terkadang melakukan penagihan perminggu, jadi setelah satu bulan baru kami setorkan ke UPK, jadi kelompok membayarnya sedikit ringan karena perminggu.”

g) Subjek SPP 7

Nama : MI

Nama Kelompok : Kenanga

Desa : Lok Gabang

Pekerjaan : Mengkreditkan Pakaian

Ibu MI adalah salah satu anggota SPP yang pinjamannya bukan hanya untuk modal usaha beliau tetapi juga digunakan untuk modal suaminya membuka usaha bengkel didepan rumah. Berikut wawancara yang telah dilakukan.

¹¹⁵Wawancara dengan subjek SPP 6 Ibu HL pada tanggal 16 Februari 2017.

Penuturan subjek SPP 7 Ibu MI :

“Umpat SPP ini awalnya aku dibawai kakawanan. Jadi oleh UPK tu dihutangnya berkelompok, jadi ditanggung oleh semua kelompoknya. Syaratnya harus meulah proposal, fotocopy KK, KTP lawan sepengetahuan suami. Amun sudah lengkap syarat-syaratnya tu hanyar pencairan, duitnya dari bari leh UPK ke ketuanya, habis tu dibagiakan ke anggota, mbah itu membayarnya ditagihi oleh ketuanya. Bila ada tunggakan biasanya ketuanya yang menagihi bila sudah parak tanggalnya, amun kada kawa bayar jua ditunggu ja sampai bisa bayar ada nang sampai seminggu labih rajin tu ada jua rajin sampai parak sebulan, bila kada kawa jua hanyar kelompok menalangi dulu.”¹¹⁶

Terjemahan :

“Ikut SPP ini pada awalnya aku diajak oleh teman. Jadi oleh UPK itu piutangnya diberikan secara berkelompok, jadi ditanggung oleh semua kelompok. Syaratnya harus membuat Proposal fotocopy KK, KTP dan sepengetahuan suami. Apabila sudah lengkap syarat-syaratnya itu barulah dilakukan pencairan, uangnya diberikan oleh UPK ke ketuanya, setelah itu dibagikan ke anggota, kemudian membayarnya akan ditagih oleh ketuanya. Apabila ada tunggakan biasanya ketuanya yang menagih bila sudah dekat tanggalnya, bila tidak bisa membayar juga akan ditunggu sampai bisa membayar, ada yang sampai seminggu ada juga terkadang juga yang ditunggu sampai hampir sebulan, bila masih tidak bisa membayar baru akan ditanggung oleh kelompok.”

h) Subjek SPP 8

Nama : LM

Nama Kelompok : Bunga Desa

Desa : Limamar

Pekerjaan : Mengkreditkan Pakaian

Penuturan subjek SPP 8 Ibu LM :

¹¹⁶ Wawancara dengan subjek SPP 7 Ibu MI pada tanggal 18 Februari 2017.

“Aku awalnya dibawai Ibu RT, jar sidin kita meulah kelompok SPP gasan dapat pinjaman dari UPK, karena syaratnya tadih nyaman aku mau umpat. Jadi utangnya ni tanggung renteng pencairan setahun sekali, pas pencairan kami bekumpul di rumah ketua atau ibu RT, kena dibagi lagi keanggota, bayarnya tu kami perbulan ke ketua atau bila sidin haur rajin ada yang ditunjuk menggantikan menjulung ke UPK.”¹¹⁷

Terjemahan :

“Awalnya saya diajak oleh Ibu RT, katanya kita membuat kelompok SPP untuk menerima pinjaman dari UPK, karena syaratnya tadi mudah makanya saya bersedia ikut. Jadi utangnya ini tanggung renteng pencairan setahun sekali, ketika pencairan kami berkumpul di rumah ketua atau Ibu RT, nanti dibagikan lagi ke anggota, bayarnya itu kami perbulan ke ketua atau bila sidin ada kesibukkan biasanya ada yang ditunjuk menggantikan untuk menyerahkan ke UPK.”

i) Subjek SPP 9

Nama : NS

Nama Kelompok : Putri Pantai

Desa : Limamar

Pekerjaan : Warung

Penuturan subjek SPP 9 Ibu NS :

“UPK nih membantu kami ni, awalnya dulu aku dibawai kawan, olehnya aku pas perlu duit jua jadi aku hakun banar, mana pas rumah ku parak sekolahan jadi aku modalkan ai bewarung halus gasan kanakan sekolahan belanja. utangnya tu barenteng jadi kami berkelompok nama kelompok ku putri pantai dulunya putri salju, syaratnya kada ngalih asal izin dari suami ja. Nah biasanya amun kada bayar kelompok membayarkan dulu kena tu ditagih ai ke urangnya.”¹¹⁸

¹¹⁷ Wawancara dengan subjek SPP 7 Ibu MI pada tanggal 18 Februari 2017.

¹¹⁸ Wawancara dengan subjek SPP 6 Ibu HL pada tanggal 16 Februari 2017.

Terjemahan :

“Upk ini membantu kami, awalnya dulu saya diajak teman, karena aku lagi perlu uang, makanya saya bersedia sekali, lebih lagi rumah saya dekat sekolahan jadi saya modalkan membuka warung kecil-kecilan untuk anak-anak sekolah jajan. Utangnya itu barenteng jadi kami berkelompok nama kelompok asaya putri pantai yang dulunya putri salju, syaratnya tidak susah asal izin dari suami saja. Nah biasanya bila ada yang tidak bisa membayar maka kelompok membayarkan terlebih dahulu nanti akan ditagih ke orangnya.”

Berdasarkan wawancara diatas penulis memperoleh informasi bahwa masyarakat mengetahui adanya UPK melalui program yang diadakan oleh pemerintah yaitu PNPM-MPd, dengan tujuan mensejahterakan taraf hidup masyarakat perdesaan, melalui pertemuan yang diadakan oleh UPK bekerja sama dengan kepala desa yang biasa disebut dengan pembakal dan tokoh masyarakat, maka terbentuklah kelompok SPP sebagai penerima dana bantuan dari program tersebut. Adapun untuk sistem yang diterapkan sepakat bahwa sistemnya adalah tanggung renteng yang sangat memudahkan kelompok dalam pengelolaan piutangnya, adapun untuk persyaratannya bisa dikatakan mudah dari proses permohonan, penyaluran hingga pengembaliannya.

Adapun dengan pinjaman yang diberikan digunakan untuk modal usaha yang sebagian besar digunakan untuk berdagang, seperti pakaian, warung makan, sembako, ponsel, bunga rampai atau yang biasa disebut mereka kembang goyang atau kembang kuburan, usaha salon, usaha bengkel, bahkan ada yang mempunyai usaha toko roti.

2. Kolektibilitas Piutang pada UPK kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Kolektibilitas adalah suatu penggolongan kredit berdasarkan cepat atau lambatnya pembayaran kredit, penggolongan ditujukan untuk melihat bagaimana kualitas kredit yang diberikan, sehingga lembaga atau bank yang memberikan kredit dapat mengetahui mengantisipasi risiko kerugian akibat kredit yang bermasalah.

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kolektibilitas piutang pada UPK demi menjamin keberlangsungan dana bergulir mereka, oleh karena itu, sebelum menganalisis bagaimana kolektibilitas piutangnya terlebih dahulu peneliti akan menguraikan penggolongan kolektibilitas UPK selama 3 tahun terakhir, berdasarkan sumber data dari UPK.

**Tabel 3. Kolektibilitas Berdasarkan Jumlah Kelompok
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Klasifikasi Kolektibilitas				
			L	DPK	KL	D	M
1	2014	31	28	2	0	0	1
2	2015	29	17	5	1	2	4
3	2016	38	29	2	0	0	7
Total		98	74	9	1	2	12

Sumber : Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Keterangan :

L : Lancar

DPK : Dalam Perhatian Khusus

KL : Kurang Lancar

D : Diragukan

M : Macet

Dari tabel 3 diatas tahun 2014 kategori L cukup bagus yaitu 28 kelompok, kategori DPK dan KL 0 dan untuk kategori M hanya ada 1 kelompok. Tahun 2015 dengan total kelompok 29 hanya ada 17 kelompok yang masuk kedalam kategori L, kategori DPL cukup besar yaitu 5 kelompok, kategori KL ada 1 kelompok, kategori D ada 2 kelompok dan untuk kategori M ada 4 kelompok. Selanjutnya untuk tahun 2016 dapat diketahui kelompok yang masuk kategori L ada 29 kelompok, untuk kategori DPK ada 2 kelompok, sedangkan untuk kategori KL dan D tidak ada, dan kategori M ada 7 kelompok.

Adapun kategori kolektibilitas berdasarkan saldo pinjaman adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

No	Klasifikasi	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kol. I/L	Rp. 543.799.500,00	Rp. 273.201.000,00	Rp.482.075.500,00
2	Kol. II/DPK	Rp. 19.930.000,00	Rp. 33.736.500,00	Rp. 31.662.500,00
3	Kol. III/KL	-	Rp. 26.902.500,00	-
4	Kol. IV/D	-	Rp. 6.319.000,00	-
5	Kol. V/M	Rp. 2.365.600,00	Rp. 39.368.100,00	Rp. 49.945.600,00
Total Saldo Pinjaman		Rp. 566.095.100,00	Rp. 379.527.100,00	Rp.563.683.600,00

Sumber : Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Berdasarkan pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa tahun 2014 kolektibilitas I/L sebesar Rp. 543.799.500,00, kolektibilitas II/DPK sebesar Rp. 19.930.000,00, kolektibilitas III/KL dan IV/D tidak ada sedangkan kolektibilitas V/M sebesar Rp. 2.365.600,00 dengan total saldo

pinjaman sebesar Rp. 566.095.100,00. Untuk tahun 2016 kolektibilitas I/L sebesar Rp. 273.201.000,00, kolektibilitas II/DPK sebesar Rp. 33.736.500,00, kolektibilitas III/KL sebesar Rp. 26.902.500,00, kolektibilitas IV/D sebesar Rp. 6.319.000,00 dan kolektibilitas V/D sebesar Rp. 39.368.100,00, adapun total saldo pinjamannya adalah Rp. 379.527.100,00. Tahun 2016 kolektibilitas I/L sebesar Rp.482.075.500,00, kolektibilitas II/DPK sebesar Rp. 31.662.500,00, untuk kolektibilitas III/KL dan IV/D tidak ada, sedangkan kolektibilitas V/M adalah sebesar Rp. 49.945.600,00, adapun total saldo pinjamannya adalah Rp.563.683.600,00.

Kategori yang tergolong kedalam kredit bermasalah atau *nonperforming loan* adalah dimulai dari kategori kolektibilitas III atau KL, kolektibilitas IV atau D dan Kolektibilitas V atau M. Maka berdasarkan dua tabel diatas dapat diolah tabel penyajian kredit yang tergolong ke dalam *nonperforming loan* sebagai berikut :

**Tabel 5. Kolektibilitas Berdasarkan *Nonperforming Loan*
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

KOL.	Tahun			Kel	Total
	2014	2015	2016		
III/KL	-	Rp.26.902.500,00	-	1	Rp.26.902.500,00
IV/D	-	Rp. 6.319.000,00	-	2	Rp. 6.319.000,00
V/M	Rp.2.365.600,00	Rp.39.368.100,00	Rp.49.945.600,00	12	Rp.91.679.300,00

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui kredit kategori KL selama 3 tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2015 hanya 1 kelompok, begitu juga untuk kategori D juga hanya terjadi pada tahun 2015 dengan total 2

kelompok, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 dan 2016 tidak terjadi KL/ kredit kurang lancar dan D/ diragukan, tetapi meskipun demikian total kredit bermasalah kategori M dari tahun 2014-2016 ada 12 kelompok dengan total Rp.91.679.300,00 angka kredit macet ini tentunya mempengaruhi penilaian kualitas kredit selama 3 tahun terakhir.

3. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Piutang Pada UPK Kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui keefektifitasan sistem pengendalian piutang yang telah diterapkan. Analisis yang digunakan penulis yaitu dengan melihat rasio perhitungan kolektibilitas dan angka kredit *nonperforming loannya*. Selain itu juga peneliti akan menganalisis keefektifitasannya dengan melakukan wawancara kepada subjek UPK terkait dengan berapa total asset selama tiga tahun terakhir dan jumlah kelompok yang mereka miliki dari tahun 0-n. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan 3 subjek dari pengurus UPK. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

Penuturan subjek UPK 1 :

“UPK disini berdiri dari tahun 2007 sejak Program PNPM disahkan. Dari awal dikururkan UPK menerima hibah dari pemerintah sebesar 300 juta, nah setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar kurang lebih 70 juta sampai 100 juta pertahunnya, contohnya pada tahun 2014 asset yang dimiliki Rp. 1,648, 241, 294, pada tahun 2015 Rp. 1,724,773,375 dan sampai sekarang asset kami sudah mencapai 1,8 miliar tepatnya Rp. 1.840.367.598,00. Untuk jumlah kelompoknya pada tahun awal satu desa wajib 1 kelompok yaitu 22 kelompok dari 22 desa, jumlah kelompok bisa mengalami peningkatan maupun penurunan, seperti 3 tahun terakhir tahun 2014 ada 31 kelompok, tahun 2015 ada 29 kelompok dan tahun 2016 ada 38 kelompok. Terkait dengan bagaimana keefektifitasannya sebenarnya sih

tanggung renteng ini menurut saya sangat tepat dalam menjamin piutang disini dan tujuannya juga untuk memudahkan dalam pengelolaan piutangnyakan, tetapi kembali pada kelompoknya masing-masing lagi, banyak diantaranya yang disiplin dalam pembayarannya, yang bagus pembayarannya kami golongkan ke kolek 1 dan 2, tetapi ada juga yang sering telat membayarnya dengan alasan yang macam-macam, jika penunggakan sudah kami anggap sangat lambat, misalnya sudah hampir 2-3 bulan belum ada kabar kepastian kapan membayar baru kami turun kelapangan mendatangi ketua kelompoknya, tapi selambat-lambatnya biasanya dibayar, pinjaman yang kami berikan ini digunakan mereka untuk modal usaha ya, jadi pendapatan mereka pun tidak pasti seharinya, mungkin ketika jualannya sepi itu yang membuat mereka menunggak membayarnya.”¹¹⁹

Dari hasil wawancara UPK telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun dari tahun 2007 sejak diluncurkannya PNPM-Mandiri oleh Presiden Indonesia ke-5 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dari tahun awal hingga akhir 2016 telah terjadi peningkatan asset sebagaimana yang telah diuraikan oleh subjek diatas. Adapun untuk jumlah kelompok pada awal terbentuknya UPK setiap desa wajib membentuk 1 kelompok yaitu 22 kelompok dari 22 desa, hingga sekarang telah terjadi peningkatan ataupun penurunan jumlah kelompok seperti 3 tahun terakhir, pada tahun 2014 ada 31 kelompok, tahun 2015 ada 29 kelompok dan tahun 2016 ada 38 kelompok.

Untuk melengkapi hasil penelitian maka peneliti juga mengadakan wawancara dengan kelompok simpan pinjam perempuan, adapun pertanyaan yang diajukan bermaksud untuk mengetahui bagaimana pendapat kelompok SPP tentang adanya UPK, apa saja kelebihan dan kelemahan dari UPK, berapa besar pinjaman awal yang diberikan oleh UPK, sudah berapa lama tergabung dalam kelompok SPP dan bagaimana dampaknya terhadap usaha

¹¹⁹Wawancara dengan subjek UPK 1 pada tanggal 13 Februari 2017.

dan perekonomian setelah tergabung dalam SPP. Hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut :

Penuturan subjek SPP 1 Ibu NH :

“Kelebihannya itu kan ini dari pemerintah, ada badan hukumnya, berkelompok, jadi selama dikelola angsurannya terurus dengan baik, waktunya satu tahun, jadi bilanya inya kadada nunggak selama satu tahun maka bisa minjam lagi, ada jua kemandiriannya jadi tanggung renteng kada memberatkan kami, cuma kendalanya rajin ada yang kada tepat waktu membayar. Adanya UPK disini sangat-sangat bagus, ada model kegotong royongannya, lawan membawai yang miskin jadi sejahtera dengan pinjamannya yang miskin jadi bisi pendapatan lawan nang usahanya kecil jadi ada tambahan modal. Kelompok kami ini sudah kurang lebih 10 tahunan dengan pinjaman awal sebesar 1 juta satu orang, sampai wahini dana nang kami kelola sudah kurang lebih 500 jutaan selama 10 tahun, nah kami ni jadi kategori terbaik juara satu kecamatan dari 22 desa karena kami jarang menunggak. Rata-rata hampir semua dikelompok kami nang di Kelampaian sudah bisi usaha, jadi pinjamannya gasan menambah modal, usahanya ada nang bewarung makan, bajualan kaya aksesories orang ziarahan, buah-buahan lawan bajualan kambang, jadi bejualannya dipinggir-pinggir jalan nang dilalui oleh peziarahan Kalampaian.”¹²⁰

Terjemahan :

“Kelebihannya ini dari pemerintah, ada badan hukumnya, berkelompok, jadi selama dikelola angsurannya ditangani dengan baik, waktunya satu tahun, jadi bila tidak ada yang menunggak selama satu tahun maka bisa meminjam lagi, ada juga kemandiriannya jadi tanggung renteng tidak memberatkan kami, cuma kendalanya terkadang ada yang tidak tepat waktu membayarnya. Adanya UPK disini sangat-sangat bagus, ada rasa kegotong royongannya dan mengajak yang miskin untuk bisa sejahtera dengan memberikan pinjaman maka yang miskin bisa mempunyai pendapatan dan usahanya yang awalnya kecil bisa mendapatkan tambahan modal. Kelompok kami ini kurang lebih sudah sekitar 10 tahun dengan pinjaman awal sebesar 1 juta satu orang, sampai sekarang dana yang kami kelola sudah kurang lebih 500 juta selama 10 tahun, nah kami ini menjadi kategori terbaik juara satu sekecamatan dari 22 desa karena kami jarang menunggak. Rata-rata hampir semua kami yang di Kalampaian

¹²⁰Wawancara dengan subjek SPP 1 pada tanggal 14 Februari 2017.

sudah punya usaha, jadi pinjamannya gasan menambah modal, usahanya ada yang punya warung makan, berjualan seperti aksesoris untuk orang ziarah, buah-buahan dan berjualan kembang, jadi berjualannya dipinggir-pinggir jalan yang dilewati oleh peziarah Kalampaian.’’

Penuturan subjek SPP 2 Ibu RH :

“Kelebihannya UPK ini kadada agunan, jadi membantu banar ka masyarakat, jadi bagus, banyak urang bahutangan, dari pada bahutang di Bank. Pinjaman awalnya cuma juta satu orang, sampai wahini ada nang kawa 10 juta minjam satu urangnya, karna kami dipercaya sudah oleh buhannya UPK. Kami ni sudah 10 tahun, dari awal adanya UPK. Adanya UPK ni lah menurutku bagus, meningkatkan pendapatan jadi bisa bausaha sorangan Ibu-Ibu disini gasan menambah penghasilan. Pokokya banyak yang terbantu, jadi bisa menambah pendapatannya tu yang mudi bajualan jadi batambah jualannya, nang kada bisi usaha jadi ada inya, usahanya kami disini kaya bajualan nang diwarung-warung muka rumah, disekolahan-sekolahan jualan gasan kakanakan, ada nang memodalkan gasan manik, kaya aku lawan bakreditan baju jua, ada jua nang manukar ayam itik gasan dihingu, maulah kandangnya jua, jadi asal pakai gasan usaha haja.’’¹²¹

Terjemahan :

“Kelebihannya UPK ini tanpa agunan, jadi membantu sekali kemasyarakat, jadi bagus, banyak orang berhutang, dari pada berhutang di Bank. Pinjaman awalnya hanya 1 juta satu orang, sampai sekarang ada yang biasa 10 juta meminjam satu orangnya, karena kami sudah dipercaya oleh mereka UPK. Kami ini sudah 10 tahun, dari awal adanya UPK. Adanya UPK ini menurut saya bagus, meningkatkan pendapatan jadi Ibu-Ibu disini bisa berusaha sendiri untuk menambah penghasilan. Pokoknya banyak yang terbantu dalam menambah pendapatan yang seperti berjualan jadi bertambah jualannya, yang tidak punya usaha jadi punya, usahanya kami disini seperti berjualan yang diwarung-warung depan rumah, disekolah-sekolahan jualan untuk anak-anak, ada yang memodalkan untuk manik, seperti saya dan mengkreditkan baju juga, ada juga yang membeli ayam dan bebek untuk dipelihara,

¹²¹Wawancara dengan subjek SPP 2 pada tanggal 14 Februari 2017.

membuat kandangnya juga, jadi yang penting uangnya digunakan untuk usaha.’’

Penuturan subjek SPP 3 Ibu SA

“Menurut ku kelebihannya tu di waktunya yang setahun haja lawan pembayaran angsurannya ditambah jasa kada banyak kada kaya bunga bila minjam di Bank, misalnya sejuta minjam selama setahun nang dibayar sejuta tambah dua ratus haja setahun dibayarnya perbulan. Amun kelemahannya asa kadada, cuma tanggung rentengnya ni jadi bila ada anggota nang kada kawa bayar, kelompok kada kawa membayarkan jua, kada dibariakan lagi leh buhannya meminjam lagi. UPK tu asa ku bagus banar, memberikan modal gasan nang handak bausaha. Pinjaman awal yang diberikan dulu 1 juta haja, lawan bila ada anggota hanyar 1 juta dulu bila hapus 1 juta kena kawa aj lagi betambah, tahun tadi nih pinjaman kami cair 41 juta gasan anggota kami, tahun ini kami dibariakan leh buhannya minjam 7-8 juta labih satu urang. Nah dengan pinjaman modal itu tadi nang usahanya kecil jadi ada tambahan modal otomatis bisa bertambah jua pendapatannya, kelompok kami kan pasti sudah ada usaha sorangan, jadi duitnya gasan menambah modal, rata-rata sudah bagus usahanya, contohnya yang bejualan dari yang sedikit ja jualannya bisa banyak jadinya. Masuk di SPP ini aku lawas sudah dari pertama, cuma dulu 5 tahunan lah aku jadi anggota saja, pas ada kawan ku nang kada kawa bayar bemasalah inya jadi kelompok ku dulu kada kawa lagi minjam, imbah tu aku meulah ai kelompok hanyar ia nang aku ketuanya wahini, urangnya aku pilih-pilih jua bila handak umpat nang bagus-bagus ja urangnya.”¹²²

Terjemahan :

“Menurut saya kelebihannya itu di waktunya yang setahun saja dan pembayaran angsurannya ditambah jasa tidak banyak seperti bunga jika meminjam di Bank, misalnya sejuta minjam selama setahun yang dibayar sejuta tambah dua ratus saja setahun dibayarnya perbulan. Tetapi kelemahannya sepertinya tidak ada, hanya saja tanggung rentengnya ini bila ada anggota yang tidak bisa membayar, kelompok tidak bisa membayarkan juga, maka tidak akan diperbolehkan mereka untuk meminjam lagi. UPK ini menurut saya bagus sekali, memberikan modal untuk yang mau berusaha. Pinjaman awal yang diberikan dulu 1 juta saja, dan bila anggota baru 1 juta dulu bila lunas 1 juta nanti bisa saja bertambah lagi, tahun tadi ini pinjaman kami cair 41 juta untuk anggota kami, tahun

¹²²Wawancara dengan subjek SPP 3 pada tanggal 14 Februari 2017.

ini kami diperbolehkan oleh mereka meminjam 7-8 juta lebih satu orang. Nah dengan pinjaman modal itu tadi yang usahanya kecil jadi mempunyai tambahan modal, otomatis pendapatannya pun bisa bertambah, kelompok kami ini sudah pasti mempunyai usaha sendiri, jadi uangnya untuk menambah modal, rata-rata usahanya sudah bagus, contohnya yang berjualan dari yang sedikit jualannya bisa bertambah. Tergabung di SPP ini saya sudah lama dari awal, cuma dulu 5 tahun saya menjadi anggota saja, ketika ada teman saya yang pembayarannya bermasalah, jadi dikelompok yang dulu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, lalu saya membuat kelompok baru dan saya yang menjadi ketuanya sekarang, anggota kelompok saya pilih-pilih juga bila mau bergabung harus orang yang baik.”

Penuturan subjek SPP 4 Ibu IS :

“Kelebihannya itu hutangnya murah, hutangnya sikap hapus lawan kadada jaminannya, syaratnya jua kada ngalih, makanya itu UPK ni baik banar ada disini gasan membari modal. Awalnya 1 juta haja satu orangnya dibari, aku jadi anggota SPP 4 s/d 5 tahunan dah kurang labih, jadi setelah dapat pinjaman modal dari UPK yang pastinya dikelompok ku tebaik pada nang dulu, kaya aku ini bisi usaha toko roti namanya Bakery Nelta di Pintu Air Martapura, pinjaman SPP ini aku mulai menambah modalnya, wahini yang begawi karyawannya 15 orang.”¹²³

Terjemahan :

“Kelebihannya itu hutangnya murah, hutangnya cepat hapus dan tidak ada jaminannya, syaratnya juga tidak susah, maka dari itu UPK disini bagus sekali untuk meminjamkan modal. Awalnya diberikan 1 juta saja satu orangnya, saya menjadi anggota SPP sudah sekitar 4s/d 5 tahun, jadi setelah mendapatkan pinjaman modal dari UPK yang pastinya dikelompok saya membaik jika dibandingkan yang dulu, seperti saya sendiri mempunyai usaha toko roti namanya Bakery Nelta di Pintu Air Martapura, dengan pinjaman dari SPP saya bisa menambah modalnya, hingga sekarang sudah memperkerjakan 15 orang karyawan.”

Penuturan subjek SPP 5 Ibu AL :

“Adanya UPK ini banyak banar manfaatnya, aku jua jadi bermanfaat olehnya aku yang meuruskan jadi memudahkan urang,

¹²³Wawancara dengan subjek SPP 4 pada tanggal 15 Februari 2017.

aku kasian melihat bila ada nang perlu duit dari pada kerentenir baik ke UPK, nyata dananya ampun pemerintah. Nah, UPK ini kada pakai agunan, jadi kepercayaan aja, tapi ngalihnya itu ada aja yang lambat membayar tagihannya. Selama menjadi anggota SPP pendapatan kami ada peningkatannya, contohnya aku dulu beusaha salon tapi pelaminan masih menyewa ke lain, jadi dengan modal dari UPK wahini aku bisi sudah lawan aku menyewakan jua pelaminan ke salon-salon lain, seminggu bisa 3-4 ratus pendapatan, usahanya jadi meningkat dengan modal nya bertambah, padahal aku hanyar 5 bulan menjadi anggota SPP, alhamdulillah.”¹²⁴

Terjemahan :

“Adanya UPK ini banyak sekali manfaatnya, saya sendiri juga bermanfaat karena saya yang mengelolanya untuk memudahkan orang, saya kasihan melihat bila ada yang perlu duit dari pada meminjam ke rentenir lebih baik ke UPK, yang pastinya dananya punya pemerintah. Nah, UPK ini tidak ada agunan, jadi atas dasar kepercayaan saja, tapi susahny pasti ada yang telat membayar tagihannya. Sejak menjadi anggota SPP pendapatan kami ada peningkatan, contohnya saya dulu mempunyai usaha salon tetapi masih menyewa pelaminan ketempat lain, jadi dengan modal dari UPK sekarang saya sudah mempunyai pelaminan sendiri dan saya juga menyewakan untuk salon-salon lain, pendapatan seminggu ada yang 4 sampai 5 ratus hasil dari menyewakan pelaminan, dengan bertambahnya modal usahanya pun meningkat, padahal saya baru 5 bulan menjadi anggota SPP, alhamdulillah.”

Penuturan subjek SPP 6 Ibu HL :

“Jadi begini nah kelebihanannya, tanpa agunan dibandingkan meminjam diluaran banyak syaratnya, dan jasa atau marginnya rendah, kalo kekurangannya kurang sosialisasi haja ke desa-desa jadi masih banyak yang belum tau adanya UPK sampai sekarang. UPK nya ni sudah bagus ja, dengan memberikan pinjaman tu kan dapat membantu keluarga yang miskin disini. Pinjaman 1 juta ja awalnya, tapi bila lancar bisa lebih dari 1 juta, sekarang kelompok kami bisa mendapatkan sampai 8-10 juta satu orangnya, olehnya kami ni lancar dalam membayarnya jadi setiap tahun mendapatkan IPTW. Jadi setelah inya dapat pinjaman modal tadi tu jelas ja meningkat penghasilannya, dulu banyak usaha yang jualannya sedikit, nah dengan tambahan modal jadi banyak jualannya otomatis keuntungannya bisa bertambah, tapi ya yang namanya jualan kada pasti jua penghasilannya. Aku sendiri sudah sekitar 4 tahun jadi anggota SPP dan merasakan sendiri adanya peningkatan

¹²⁴Wawancara dengan subjek SPP 5 pada tanggal 15 Februari 2017.

pastinya usaha kelompok aku, kalo aku sendiri sebenarnya cuma membantu mengelola oleh ditunjuk diamanahi pembakal menjadi ketua kelompok, jadi aku buka usaha pulsa ja dari pada memakai duit pinjamannya ja.”¹²⁵

Terjemahan :

“Jadi begini nah kelebihannya, tanpa agunan dibandingkan meminjam diluar banyak syaratnya, dan jasa atau marginnya rendah, kalo kekurangannya kurang sosialisasi saja ke desa-desa jadi masih banyak yang belum mengetahui adanya UPK sampai sekarang. UPK disini sudah bagus saja, dengan memberikan pinjaman itu dapat membantu keluarga yang miskin disini. Pada awalnya pinjaman diberikan sebesar 1 juta saja, tapi bila lancar bisa lebih dari 1 juta, sekarang kelompok kami bisa mendapatkan sampai 8-10 juta satu orangnya, karena kami ini lancar membayarnya jadi setiap tahun mendapatkan IPTW. Jadi setelah mendapatkan modal pinjaman jelas saja meningkat penghasilannya, dulu banyak mempunyai usaha tapi dagangannya sedikit, nah dengan tambahan modal, dagangannya bertambah banyak otomatis keuntungannya juga bertambah, tetapi yang namanya berdagang tidak pasti juga penghasilannya. Saya sendiri sudah sekitar 4 tahun menjadi anggota SPP dan merasakan sendiri adanya peningkatan usaha yang pasti dikelompok saya, kalo saya sendiri sebenarnya cuma membantu mengelola karena ditunjuk dan diamanahi oleh pembakal menjadi ketua kelompok, jadi saya membuka usaha pulsa untuk menggunakan duit pinjamannya saja.”

Penuturan subjek SPP 7 Ibu MI :

“Kelebihannya nyaman syaratnya, kadada kaya jaminannya dan menurutku program UPK ni bagus banar. Pinjaman awal nya 1 juta, amun minjam kedua kali kawa 2-3 juta, wahini kelompok kami boleh minjam 7-8 juta. Aku hanyar 3 tahun ini jadi anggota SPP jadi selama ini alhamdulillah sudah bisa membantu menambah pemasukan jua. Modal dari SPP sepalih gasan modal lakiku membengkel, dari yang dahulukan laki ku kurang modal bengkelnya, jadi modal dari SPP ini gasan nambah modal usaha laki ku lawan aku jua mengkreditkan baju.”¹²⁶

¹²⁵Wawancara dengan subjek SPP 6 pada tanggal 16 Februari 2017.

¹²⁶Wawancara dengan subjek SPP 7 pada tanggal 14 Februari 2017.

Terjemahan :

“Kelebihannya persyaratannya mudah, tidak ada jaminan dan menurut saya program UPK ini bagus sekali. Pinjaman awalnya 1 juta, bila meminjam untuk kedua kalinya bisa 2-3 juta, sekarang kelompok kami boleh meminjam 7-8 juta, Saya baru 3 tahun ini jadi alhamdulillah sudah bisa membantu menambah pemasukan juga. Modal dari SPP sebagian untuk modal suami saya membengkel, dari yang sebelumnya suami saya kekekurangan modalnya, jadi modal dari SPP ini untuk menambah modal usaha suami saya dan saya juga mengkreditkan baju.”

Penuturan subjek SPP 8 Ibu LM :

“Syaratnya tadih nyaman kada mempersulit, kadang lo amun kita minjam ke bank tuh macam-macam syaratnya kalo, tapi di UPK ni kada. Awalnya bisa 1 atau 2 juta ja bila hanyar minjam tapi kena bila lawas bisa betambah tergantung kita jua meajuakannya handak minjam berapa. Aku sudah 10 tahunan jua kadang aku modalkan tapi kadang jua sepalih aku pakai ka lain bila mendadak yang penting kawa ja membayar, dulu tu kada bisa napa-napa alhmdulillah aku wani bemodal dari UPK biar halus ja dulu yang penting ada pemasukan sampai wahini ada.”¹²⁷

Terjemahan :

“Syaratnya tadi mudah tidak memberatkan, terkadang bila kita minjam ke bank itu macam-macam syaratnya kan, tapi di UPK tidak. Awalnya bisa 1 atau 2 juta saja bila baru minjam tapi nanti bila lama bisa bertambah tergantung kita juga mengajukannya mau minjam berapa. Aku sudah 10 tahunan jua kadang aku modalkan tapi kadang juga sebagian aku gunakan ke lain bila mendadak yang penting bisa membayar, dulu itu tidak bisa apa-apa alhmdulillah saya berani bermodal dari UPK walaupun kecil saja dulu yang penting pemasukan sampai sekarang ada.”

Penuturan subjek SPP 9 Ibu NS :

“Menurut ku bagus haja adanya UPK disini, jadi aku dari pertama sudah umpat dulu aku minjam 1-4 juta ja gasan membuka warung lawan menukar jejualannya. Cuma olehnya bekelompok tu nah bila ada satu kada bayar kana barataan kami. Warung ku dari dulu kaini

¹²⁷ Wawancara dengan subjek SPP 7 Ibu MI pada tanggal 18 Februari 2017.

haja halus dulu kada tapi banyak jualan ku tapi wahini lumayan tabanyak lawan ada kulkasnya sudah. Banyak Ibu-Ibu kaya aku yang awalnya minta duit ke laki haja jadi bisi beusaha sorangan.”¹²⁸

Terjemahan :

“Menurut saya bagus saja UPK disini, jadi saya dari pertama sudah ikut dulu saya meminjam 1-4 juta saja untuk membuka warung dan membeli barang julannya. Cuma olehnya berkelompok itu nah bila ada satu kada bayar kami semua kena. Warung ku dari dulu kecil begini saja tidak banyak jualan tapi sekarang lumayan lebih banyak dan sudah ada kulkas, Banyak Ibu-Ibu seperti aku yang dulunya hanya meminta uang dari suami sekarang sudah punya usaha sendiri.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar berpendapat bahwa dalam mendapatkan pinjaman piutang dari UPK tidak memberatkan karena persyaratannya yang mudah untuk dipenuhi dan tanpa jaminan, sistem tanggung rentengnya pun menjadi daya tarik sendiri karena dengan adanya tanggung renteng maka mengajarkan masing-masing kelompok untuk bekerja sama dan disiplin, meskipun pada pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti terjadinya keterlambatan pembayaran.

Respon dari masyarakat terhadap adanya UPK sangat positif, karena menurut mereka kehadiran UPK melalui program pemerintah sangat membantu para pengusaha kecil serta Ibu-Ibu yang pada mulanya tidak memiliki usaha agar bisa mandiri dan membantu perekonomian keluarganya sehingga beban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak sepenuhnya ditanggung oleh kepala rumah tangga.

¹²⁸Wawancara dengan subjek SPP 6 Ibu HL pada tanggal 16 Februari 2017.

Pinjaman pertama yang diberikan oleh UPK adalah sebesar 1 juta, jika pinjaman awal terbayarkan dalam waktu 1 tahun maka kelompok dapat mengajukan pinjaman lagi, untuk kelompok yang tidak tergolong kedalam kelompok kredit macet maka bisa mengajukan jumlah pinjaman yang lebih banyak dari pinjaman sebelumnya. Selain itu juga penulis juga mengetahui bahwa telah terjadi perkembangan usaha dengan bertambahnya modal dan dengan bertambahnya modal maka akan meningkatkan pendapatan.

C. Analisis Penelitian

1. Sistem Pengendalian Piutang yang Diterapkan Oleh UPK Kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Keberlangsungan UPK mengelola dana bergulir bergantung pada sistem pengendalian piutangnya, sehingga tujuan dari adanya pemberian piutang oleh UPK sendiri dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada lebih banyak anggota atau calon anggota lainnya, dengan demikian *faedah* dari program tersebut akan semakin banyak, dengan kata lain akan semakin banyak juga masyarakat yang terbantu dalam hal pembiayaan usaha.

Seperti yang telah diuraikan pada kajian teori di BAB II, Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu berdasarkan tujuan dan jangka waktu piutangnya.

Dikaitkan dengan teori tersebut piutang yang diberikan oleh UPK disebut dengan pembiayaan karena merupakan suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk dipergunakan dalam suatu usaha, pembiayaan diberikan dengan syarat harus dipergunakan sebaik-baiknya baik itu untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Jenis pembiayaan oleh UPK menurut tujuannya adalah pembiayaan modal usaha yang dimaksudkan untuk memberikan modal dalam rangka pengembangan usaha, sedangkan menurut jangka waktunya adalah pembiayaan jangka pendek yang dilakukan dengan waktu 1 tahun.

Pembiayaan ini sejalan dengan apa yang disampaikan pada kajian teori di BAB II, menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam*, dalam Islam memberikan hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib bila orang yang hendak berhutang benar-benar dalam keadaan membutuhkan atau darurat, hal ini tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya hidup ini kita harus saling tolong-menolong dan memberikan piutang tentunya amat besar manfaatnya.

Jadi tujuan pemberian piutang yang dilakukan oleh UPK ini tidak lain adalah untuk mendorong para Ibu-Ibu agar lebih produktif sehingga bisa lebih mandiri dalam membantu perekonomian keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bantuan modal untuk mengembangkan atau menjalankan suatu usaha, hal ini sejalan dengan

ajaran Islam untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹³⁰

Ayat diatas mengajarkan kita bahwa *Ta'awun*/tolong-menolong merupakan suatu kebaikan dan juga sebagai bentuk ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Jadi pembiayaan diberikan dengan syarat harus di gunakan sebaik-baiknya baik itu untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada, kehadiran UPK juga sangat bermanfaat dalam mengurangi angka pengangguran, mengajarkan kemandirian dan kerja sama. Hal demikian sejalan dengan tujuan dari pembiayaan dalam Islam yaitu bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.

Hasil wawancara penulis mengenai sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK dengan subjeknya adalah 3 orang pengurus UPK di Kec. Astambul sepakat mengatakan bahwa sistem piutang yang diterapkan yaitu sistem tanggung renteng, yaitu piutang yang diberikan

¹²⁹QS Al-Maidah (5) ayat 2.

¹³⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *Syaamil Qur'an...*, h. 106.

secara berkelompok, jadi dengan sistem ini apabila ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar tepat waktu maka pembayaran akan ditanggung oleh semua anggota, untuk menghindari terjadinya penunggakan pembayaran.

Selain itu hasil wawancara dengan 9 subjek dari kelompok SPP yaitu, Ibu NH, RH, AH, IS, AL, HL, MI, LM dan NS menyatakan bahwa yang diterapkan UPK dalam pengendalian piutang adalah tanggung renteng dengan sanksi lokal.

a) Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng sejalan dengan apa yang telah diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata yang diuraikan pada kajian teori BAB II mengenai prosedur perguliran dana program SPP menggunakan sistem tanggung renteng, adapun bunyinya yaitu *“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perkataan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika didalan persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara orang berpiutang.”*

Tanggung renteng adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Manfaat dari

tanggung renteng ini adalah meringankan beban sehingga pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.¹³¹

Sebagaimana definisi dari tanggung renteng, semua anggota yang tergabung dalam kelompok saling bertanggung jawab atas setiap keputusan dengan melalui proses musyawarah terlebih dahulu, seperti pengambilan keputusan jumlah pinjaman yang akan diajukan dan penyelesaian masalah tagihan. Pola tanggung renteng ini mengandung nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, kejujuran, saling keterbukaan, kebersamaan dan kepercayaan, dengan seperangkat nilai-nilai tersebut maka sistem ini dijadikan sebagai pengaman asset, ketika semua nilai tersebut dapat dijunjung tinggi maka pengamanan assetnya pun akan semakin kuat begitu juga sebaliknya.

Piutang dengan sistem tanggung renteng ini apabila ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka akan ditanggung sementara oleh semua anggota kelompok, sehingga seluruh dari angsuran yang harus disetorkan ke UPK sesuai dengan jumlah tagihan dan tepat waktu, cara ini terbilang efektif dan dapat mengamankan asset dari UPK dan menjamin keberlangsungan mereka.

¹³¹ Amarta, "Tanggung Renteng, Cara Berinvestasi Yang Aman Dan Menguntungkan." Diambil dari :<https://amartha.com/blog/tanggung-renteng-cara-berinvestasi-yang-aman-dan-menguntungkan/#more-274>. (Online : 07 Maret 2017 Pukul 09:30 WIB).

Piutang oleh UPK sejalan dengan unsur-unsur kredit sebagaimana yang telah disajikan pada BAB II, sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Dana yang dikucurkan oleh UPK merupakan dana amanah yang digulirkan kepada kelompok SPP dengan ketentuan berlaku dan tanpa jaminan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan memberikan pinjaman akan diputuskan oleh UPK setelah rapat MPP, kemudian pencairan dana akan dilakukan langsung oleh UPK dengan turun kelapangan dalam rangka penyerahan dana pinjaman kepada kelompok SPP, penyerahan pinjaman kepada ketua kelompok oleh ketua UPK akan disaksikan oleh anggota kelompok beserta pihak UPK sendiri yang kemudian akan didokumentasikan dan dilaporkan pada berita acara. Setiap pembayaran tagihan akan dibuktikan dengan slip pembayaran yang ditanda tangani oleh penyetor dan penerima oleh pihak UPK yang bertugas.

3) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu yang pinjaman oleh UPK adalah satu tahun, setelah satu tahun lunas kelompok dapat mengajukan pinjaman kembali dengan memenuhi ketentuan tertentu.

4) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau kebangkrutannya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya. Selain tenggang waktu penyebab besarnya risiko yang harus ditanggung oleh UPK adalah piutang tanpa jaminan yang artinya piutang tersebut tanpa pagar pengaman.

5) Balas jasa

Pada UPK pembiayaan diberikan bukan untuk mencari laba tetapi dengan tujuan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, meskipun demikian setiap pinjaman akan dikenakan biaya administrasi yang disebut dengan jasa pinjaman sebesar 20%, misalnya pinjaman pada satu kelompok sebesar Rp. 1.000.000 dengan jasa pinjaman 20% maka total pengembalian selama satu tahun adalah Rp. 1.200.000 yang artinya pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 100.000, jika pembayaran dilakukan tepat waktu maka 10% dari total pengembalian akan dikembalikan lagi untuk kas kelompok.

b) Sanksi Lokal

Sanksi lokal adalah sanksi yang diberikan kepada kelompok yang melakukan tunggakan serta juga penundaan pencairan bagi kelompok lain yang berada dalam satu desa dengan kelompok tersebut, penundaan tersebut berlaku sampai kelompok yang melakukan tunggakan melaksanakan pembayaran angsuran atau jika pengelola UPK melakukan penghapusan piutang (karena kerugian pada periode akuntansi tertentu), jadi dengan sistem tersebut maka upaya untuk menjamin kelancaran angsuran tidak hanya dilaksanakan oleh pihak pengelola UPK atau pun ketua kelompok saja, melainkan seluruh anggota kelompok SPP yang ada di desa yang bersangkutan serta peranan dari kepala desa untuk memberikan pembinaan pada masyarakatnya yang tergabung dalam kelompok SPP berupa teguran dari kepala desanya.

Kemudian untuk kelompok yang pembayarannya lancar maka akan mendapatkan IPTW, adapun IPTW adalah Insentif Pembayaran Tepat Waktu yaitu 20 % dari laba keutungan, misalkan pinjaman selama satu tahun adalah 20 juta+4 juta jasa pinjaman total pembayaran satu tahun 24 juta, jadi IPTW yang didapatkan adalah 20% dari surplus pinjaman 4 juta, artinya ketika banyak kelompok yang mendapatkan IPTW maka angka pengembaliaanya tinggi.

Selain mendapatkan IPTW kelompok yang pembayaran angsurannya lancar dan tidak bermasalah maka diperbolehkan

mendapatkan pinjaman lagi setelah periode pinjaman berakhir yaitu dalam masa 1 tahun dengan jumlah pinjaman lebih besar dari sebelumnya, dalam proses peminjaman kembali meskipun yang bersangkutan dikategorikan lancar dalam pembayaran angsuran sebelumnya tetap harus mengikuti prosedur awal dari tahapan pertama hingga terakhir guna menjamin keberlangsungan dari piutang itu sendiri.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pinjaman dan mekanisme dari penyaluran dan perguliran dana berdasarkan wawancara bisa dibilang cukup mudah yaitu :

- 1) Proposal permohonan pembiayaan,
- 2) Surat izin dari suami atau keluarga lainnya,
- 3) fotocopy KTP dan
- 4) KK semua anggota

Selain itu juga setiap anggota kelompok harus dapat memastikan bahwa dana yang nantinya mereka dapatkan benar-benar akan digunakan untuk modal usaha, jadi dana yang diberikan benar-benar dana amanah yang akan dipertanggungjawabkan semua anggota kelompoknya, dengan cara demikianlah diharapkan penyelewengan dana dapat dihindari. Adapun untuk mekanisme penyaluran dan pengembaliannya sebagai berikut:

a. Persiapan Kelompok

Persiapan kelompok yaitu dengan membentuk suatu kelompok yang terdiri dari Ibu-Ibu rumah tangga minimal satu kelompok terdiri dari 6 orang dan maksimal 25 orang, namun dari pihak UPK sendiri menyarankan agar satu kelompok tidak terlalu banyak memiliki anggota dikarenakan semakin banyak jumlah anggota dalam satu kelompok maka akan semakin sulit dalam penagihan piutangnya.

b. Pengajuan Proposal usulan SPP oleh Kelompok

Kelompok yang sudah terbentuk kemudian akan mengajukan proposal permohonan pinjaman disertai dengan berkas-berkas terkait, dengan rekomendasi dari kepala desa.

c. Pemeriksaan berkas oleh UPK

Kemudian proposal dan berkas yang telah diajukan akan diperiksa kelengkapannya oleh pengurus UPK dan juga untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pinjaman dalam kelompok, setelah lulus dari seleksi berkas tahapan selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi

d. Verifikasi oleh tim verifikasi

Tim verifikasi akan membuat dan mengadakan jadwal kunjungan ke kelompok bersama dengan UPK, untuk melihat kelayakan kelompok sebagai penerima pinjaman untuk dilaporkan dalam forum MPP.

e. MPP yaitu Musyawarah Pendanaan perguliran

Pada pertemuan ini akan diadakan rapat berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh tim verifikasi terkait dengan kelayakan kelompok dalam menerima pinjaman, yang dihadiri oleh Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD), kepala desa, tim verifikasi dan UPK .

f. Validasi oleh tim Validasi

Setelah keputusan pendanaan dikeluarkan dalam berita acara berdasarkan rapat MPP maka tahapan selanjutnya yaitu validasi dengan mengadakan pertemuan antara tim validasi, UPK tim pendanaan dan kelompok yang bersangkutan.

g. Pencairan oleh UPK

Setelah divalidasi barulah akan dibuat jadwal pencairan dana bergulir tersebut ke kelompok yang diketahui oleh BKAD.

h. Pengembalian atau pembayaran angsuran pinjaman oleh kelompok

Adapun pengembalian tersebut berjalan dengan sistem tanggung renteng sehingga pembayaran akan sesuai dengan tagihan dan resiko pengembalian macet dapat dihindari.

Dari uraian diatas peneliti berkesimpulan bahwa sistem yang telah diterapkan sistem yang diterapkan dalam pengendalian piutangnya adalah tanggung renteng dan juga penerapan sanksi lokal. Meskipun terbilang cukup efektif dalam menjamin keberlangsungan piutangnya namun tetap saja tidak lepas dari kerja sama semua pihak, seperti kepala

desa, pengurus UPK sendiri, ketua kelompok dan anggota kelompok, dimana setiap anggota harus disiplin dalam memenuhi kewajibannya dan mempergunakan dana yang diberikan dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan ketua kelompok sebagai penerima angsuran dari anggotanya harus benar-benar amanah, dari pihak UPK sendiri harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kerja sama semua pihak ini sangat diperlukan dalam menjamin keberlangsungan piutangnya sehingga dapat terus memberikan manfaat kepada kelompok yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung dalam upaya meningkatkan perekonomiannya dan terus dapat membawa dampak positif bagi masyarakat disekitarnya.

2. Kolektibilitas Piutang Pada UPK kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan

a. Perkembangan Pencairan Dana Pinjaman

Dalam menganalisis kolektibilitias piutang terlebih dahulu penulis akan menguraikan data perkembangan saldo pinjaman selama 3 tahun terakhir, berikut ini data perkembangan untuk tahun 2014 s/d 2016.

**Tabel 6. Perkembangan Saldo Pinjaman
Unit Pengelola Kegiatan Kec. Astambul Kab. Banjar**

Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Saldo Pinjaman	Selisih Pinjaman
2014	31	Rp. 566.095.100,00	
2015	29	Rp. 379.527.100,00	(Rp.186.568.000,00)
2016	38	Rp. 563.683.600,00	Rp. 184.156.500,00
Total Saldo pinjaman		Rp. 1.509.305.800,00	

Sumber : Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Berdasarkan penyajian data diatas jumlah kelompok pada tahun 2014 adalah 31 kelompok dari 22 desa dengan total saldo pinjaman sebesar Rp. 566.095.100,00. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah kelompok menjadi 29 kelompok dari 22 desa dengan total pinjaman sebesar Rp. 379.527.100,00. Pada tahun 2016 baik dari jumlah kelompok maupun dari total saldo pinjaman telah mengalami peningkatan, adapun jumlah kelompok tahun 2016 sebesar 38 kelompok dari 22 desa dan dengan total saldo pinjaman sebesar Rp.563.683.600,00.

Setelah mengetahui perkembangan saldo pinjaman selama tiga tahun terakhir maka selanjutnya peneliti menganalisis kolektibilitas piutangnya. Adapun alat analisis yang digunakan adalah perhitungan kolektibilitas dan perhitungan *nonperforming loan*.

2. Perhitungan Kolektibilitas Kredit 3 Tahun Terakhir

Berikut penggolongan kolektibilitas UPK selama 3 tahun terakhir, berdasarkan sumber data yang diperoleh dari UPK.

**Tabel 7.Data Penggolongan Kolektibilitas
Unit Pengelola Kegiatan Kec. Astambul Kab. Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

No	Klasifikasi	Tahun		
		2014	2015	2016
1	L	Rp.543.799.500,00	Rp.273.201.000,00	Rp.482.075.500,00
2	DPK	Rp. 19.930.000,00	Rp. 33.736.500,00	Rp. 31.662.500,00
3	KL	-	Rp. 26.902.500,00	-
4	D	-	Rp . 6.319.000,00	-
5	M	Rp. 2.365.600,00	Rp. 39.368.100,00	Rp. 49.945.600,00

Sumber : Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Berdasarkan penyajian data dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk klasifikasi kolektibilitas I/L pada 2014 ada sebesar Rp.543.799.500,00 dari total pinjaman sebesar Rp.566.095.100,00, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi Rp. 273.201.000,00 dari total pinjaman sebesar Rp.379.527.100,00. Sedangkan untuk tahun 2016 kembali mengalami peningkatan hingga Rp. 482.075.500,00 dari total pinjaman sebesar Rp. 563.683.600,00. Sedangkan untuk klasifikasi kolektibilitas II/DPK mengalami penurunan setiap tahunnya, selanjutnya kategori klasifikasi kolektibilitas III/KL mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2015 dari pada tahun sebelumnya dan untuk tahun 2016 berada pada angka 0. Untuk klasifikasi kolektibilitas IV/D pada tahun 2014 dan 2016 juga berada pada angka 0 dan tahun 2015 sebesar Rp.6.319.000,00. Sementara itu untuk kategori kolektibilitas V/ M dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sedangkan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan.

3. Rasio Kredit berdasarkan data Kolektibilitas

Berikutnya yaitu perhitungan rasio kredit terhadap total kredit berdasarkan data kolektibilitas yang sudah diperoleh dari tahun 2014 s/d 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Rasio Kredit Lancar

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 543.799.500}}{\text{Rp. 566.095.100}} \times 100\% = 96,06 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 273.201.000}}{\text{Rp. 379.527.100}} \times 100\% = 71,98 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 482.075.500}}{\text{Rp. 563.683.600}} \times 100\% = 85,52 \%$$

Dari hasil perhitungan rasio kredit lancar terhadap total kredit oleh UPK diketahui pada tahun 2014 rasio kredit lancarnya sebesar 96,06 %, sedangkan pada tahun 2015 berada pada 71,98 %, kemudian untuk tahun 2016 rasio kredit lancarnya kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 85,52 %.

2) Rasio Kredit Dalam Perhatian Khusus

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 19.930.000}}{\text{Rp. 566.095.100}} \times 100\% = 3,52 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 33.736.500}}{\text{Rp. 379.527.100}} \times 100\% = 8,89 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 31.662.500}}{\text{Rp. 563.683.600}} \times 100\% = 5,62 \%$$

Besarnya rasio kredit dalam perhatian khusus pada tahun 2014 yaitu 3,52 %, sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 8,89 % dan tahun 2016 sebesar 5,62 %.

3) Rasio Kredit Kurang Lancar

$$\text{Tahun 2014} = \frac{0}{\text{Rp. 566.095.100}} \times 100\% = 0 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 26.902.500}}{\text{Rp. 379.527.100}} \times 100\% = 7,09 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{0}{\text{Rp. 563.683.600}} \times 100\% = 0 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui untuk rasio kolektibilitas kredit kurang lancar tahun 2014 dan 2016 adalah 0 % sedangkan untuk tahun 2015 mencapai 7,09 %.

4) Rasio Kredit Diragukan

$$\text{Tahun 2014} = \frac{0}{\text{Rp. 566.095.100}} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 6.319.000}}{\text{Rp. 379.527.100}} \times 100\% = 1,66 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{0}{\text{Rp. 563.683.600}} \times 100\% = 0\%$$

Besarnya rasio kategori kredit diragukan berdasarkan perhitungan diatas pada tahun 2014 dan 2016 0% sedangkan tahun 2015 1,66 %.

5) Rasio Kredit Macet

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 2.365.600}}{\text{Rp. 566.095.100}} \times 100\% = 0,42 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 39.368.100}}{\text{Rp. 379.527.100}} \times 100\% = 10,37 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 49.945.600}}{\text{Rp. 563.683.600}} \times 100\% = 8,86 \%$$

Adapun besarnya rasio kategori kredit macet pada tahun 2014 hanya 0,42 %, sedangkan angka yang cukup besar ada

pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 10,37 % dan tahun 2016 sebesar 8,86 %.

Setelah perhitungan rasio kredit pada masing-masing kategori kolektibilitas tersebut maka dapat disajikan tabel rasio kolektibilitas selama tahun 2014 s/d 2016 sebagai berikut :

**Tabel 8.Rasio Kolektibilitas Kredit Terhadap Total Kredit
Unit Pengelola Kegiatan Kec. Astambul Kab. Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

Tahun	Kolektibilitas (%)				
	L	DPK	KL	D	M
2014	96,06 %	3,52 %	0 %	0 %	0,42 %
2015	71,98 %	8,89 %	7,09 %	1,66 %	10,37 %
2016	85,52 %	5,62 %	0 %	0 %	8,86 %
Total	253,57 %	18,03 %	7,09 %	1,66 %	19,65 %
Rata-rata	84,52 %	6,01 %	2,36 %	0,55 %	6,55 %

Sumber : Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Dari hasil perhitungan rasio kredit yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, analisis selama 3 tahun terakhir dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Kredit lancar pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan.
- Kredit dalam perhatian khusus mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun 2016.
- Kredit kurang lancar berada pada 0% pada tahun 2014 dan 2016, sedangkan tahun 2015 7,09 %.

- d. Kredit diragukan juga demikian pada tahun 2014 dan 2016 berada pada 0 %, sedangkan tahun 2016 sebesar 1,66 %.
- e. Kredit macet pada tahun 2014 sebesar 0,42 % sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 cukup besar yaitu 10,37 % dan 8,86 %.

Meskipun pada tahun 2014 rasio kredit macetnya kecil namun besarnya rasio kredit pada dua tahun terakhir sangat berpengaruh pada perhitungan kolektibilitas pada tiga tahun terakhir. Demikianlah hasil perhitungan rasio kolektibilitas selama 3 tahun terakhir pada Pada Unit Pengelola Kegiatan Kec. Astambul Kab. Banjar.

4. Perhitungan *Nonperforming loan*

Setelah mengetahui rasio kolektibilitas kredit selama tiga tahun terakhir langkah selanjutnya yaitu menganalisis bagaimana kualitas kredit dengan alat yang digunakan yaitu perhitungan *Nonperforming loan* atau NPL berdasarkan data kolektibilitas yang diperoleh. Kredit yang dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) adalah kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Berikut data *Nonperforming loan* selama tiga tahun terakhir :

Tabel 9.Data Kredit Nonperforming Loan
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016

No	Kategori NPL	Tahun			Kel	Total
		2014	2015	2016		
1	Kol. III/KL	-	Rp.26.902.500,00	-	1	Rp.26.902.500,00
2	Kol. IV/D	-	Rp. 6.319.000,00	-	2	Rp. 6.319.000,00
3	Kol. V/M	Rp.2.365.600,00	Rp.39.368.100,00	Rp.49.945.600,00	12	Rp.91.679.300,00

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui kredit kategori KL selama 3 tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2015 hanya 1 kelompok, begitu juga untuk kategori D juga hanya terjadi pada tahun 2015 dengan total 2 kelompok, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak terjadi KL/ kredit kurang lancar dan D/ diragukan, tetapi meskipun demikian total kredit bermasalah kategori M dari tahun 2014-2016 ada 12 kelompok dengan total Rp.91.679.300,00 angka kredit macet ini tentunya mempengaruhi penilaian kualitas kredit selama 3 tahun terakhir.

Tahap selanjutnya perhitungan rasio NPL dengan menggunakan rumus:

$$NPL = \frac{KL + D + M}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah perhitungan berikut akan disajikan tabel kolektibilitas kredit kategori Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

**Tabel 10.Total Kredit Kategori KL,D dan M
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

Kategori NPL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Kurang Lancar	0	Rp. 26.902.500	0
Diragukan	0	Rp. 6.319.000	0
Macet	R. 2.365.600	Rp.39.368.100	Rp.49.945.600
Total KL, D, M	Rp. 2.365.600	Rp.72.589.600	Rp.49.945.600
Total Pinjaman	Rp.566.095.100	Rp.379.527.100	Rp.563.683.600

Sumber : Data diolah

- a) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2014

$$\text{NPL} = \frac{\text{Rp. 2.365.600,00}}{\text{Rp.566.095.100,00}} \times 100\% = 0,42 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas besarnya rasio NPL pada tahun 2014 berdasarkan jumlah kredit kurang lancar, diragukan dan macet adalah sebesar 0,42 %.

- b) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2015

$$\text{NPL} = \frac{\text{Rp. 72.589.600,00}}{\text{Rp. 379.527.100,00}} \times 100\% = 19,13 \%$$

Adapun rasio NPL pada tahun 2015 berdasarkan perhitungan diatas sebesar 19,13 %.

- c) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2016

$$\text{NPL} = \frac{\text{Rp. 49.945.600,00}}{\text{Rp. 563.683.600,00}} \times 100\% = 8,86 \%$$

Dengan demikian besarnya rasio NPL pada tahun 2016 berdasarkan perhitungan diatas adalah 8,86 %.

Setelah diketahui rasio NPL berdasarkan kategori kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet maka dapat disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 11. Hasil Perhitungan *Non Performing Loan*
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

Tahun	<i>Nonperforming Loan</i> %	Pertumbuhan %
2014	0,42 %	-
2015	19,13 %	(18,71 %)
2016	8,86 %	10,27 %
Rata-Rata	9,47	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas perhitungan NPL selama tiga tahun terakhir dari 2014 s/d 2016 rata-rata pertumbuhan sebesar 9,47 % dengan rincian pada tahun 2014 0,42 % pada tahun 2015 sebesar 19,13 % dan tahun 2016 sebesar 8,86 %. Besarnya angka rata-rata NPL selama tiga tahun terakhir pada UPK dalam penyaluran kreditnya dapat dikatakan kualitasnya cukup karena mencapai angka yang cukup besar pada dua tahun terakhir.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan diatas maka yang terakhir akan dilakukan analisa pada semua kategori kolektibilitas selama tiga tahun terakhir, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 12. Analisa Data Kolektibilitas
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016

Tahun	Kolektibilitas (%)					NPL
	L	DPK	KL	D	M	
2014	96,06 %	3,52 %	0 %	0 %	0,42 %	0 %
2015	71,98 %	8,89 %	7,09 %	1,66 %	10,37 %	19 %
2016	85,52 %	5,62 %	0 %	0 %	8,86 %	9 %
Total	253,57%	18,03 %	7,09 %	1,66 %	19,65 %	28 %
Rata-rata	84,52 %	6,01 %	2,36 %	0,55 %	6,55 %	9 %

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukan bahwa selama 3 tahun terakhir persentase kolektibilitas untuk kategori lancar sebesar 84,52%, Dalam Perhatian Khusus 6,01 %, Kurang Lancar sebesar 2,36 % , Diragukan sebesar 0,55 % dan untuk Macet sebesar 6,55 %.

Kemudian untuk analisis NPL terlihat pada rata-rata 3 tahun terakhir sebesar 9, hal ini disebabkan pada kinerja tahun 2015 dimana NPL nya berada pada angka 19 sehingga sangat berpengaruh pada perhitungan NPL pada tahun 2014 dan 2016. Adapun menurut ketentuan Bank Indonesia saat ini adalah 5% jika presentase nya melebihi dari 5 % maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Adapun penaksiran klasifikasinya :

- a. Resiko rendah (low) bila masih berada dibawah 5%
- b. Resiko sedang (moderat) bila berada pada angka 5%-10%
- c. Resiko tinggi (high) bila berada diatas 10%

Berdasarkan klasifikasi tersebut semakin kecil angka presentase NPL maka kinerja kreditnya semakin baik, sedangkan jika semakin besar

maka menunjukkan kinerja pengendalian piutangnya semakin tidak profesional. Untuk NPL pada tahun 2014 sangat bagus karena berada pada angka 0 %, tetapi kinerja pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga angka NPL mencapai 19 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2015 sangat rendah dan memberikan indikasi bahwa tingkat risiko yang dihadapi tinggi. Sementara ini pada tahun 2016 angka NPL mengalami penurunan yaitu mencapai angka 9% yang artinya tingkat resiko yang dihadapi dalam kategori sedang. Berdasarkan analisis NPL 3 tahun terakhir tersebut maka diperoleh rata-rata NPL sebesar 9% berada pada kategori resiko sedang (moderat).

Pada UPK peningkatan angka NPL itu terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Perubahan kebijakan

Kebijakan dari pemerintah yang menyalurkan dana fisik desa tidak lagi melalui program PNPM tetapi dana langsung disalurkan ke Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Jadi sanksi lokal yang berlaku kurang berfungsi.

b. Besarnya angka kredit macet

Besarnya angka kredit pada dua tahun terakhir disebabkan karena keterlambatan pembayaran dari para kelompok SPP, hal ini dapat terjadi ketika seperangkat nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng tidak terealisasikan dengan baik.

c. Persepsi yang salah

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti kelompok yang mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh persepsi mereka yang salah yaitu dana digulirkan adalah dana pemerintah yang memang ditujukan untuk masyarakat sehingga tidak perlu dibebankan dalam pengembaliannya jadi tidak masalah jika terlambat dalam pembayaran angsurannya. Sebenarnya dana pemerintah yang dikucurkan merupakan tanggung jawab semua pihak dan menjadi milik bersama jadi setiap piutang harus dibayarkan sesuai ketentuan berlaku sehingga dana tersebut dapat terus digulirkan sebagaimana semestinya sehingga tidak terjadi penumpukan dana sepihak.

d. Tidak diberlakukannya jaminan

Tidak diberlakukannya jaminan menjadi kemudahan dan daya tarik sendiri bagi kelompok SPP dalam mendapatkan pinjaman, tetapi tetap saja jaminan merupakan pagar pengaman dalam sebuah penyaluran kredit, dengan adanya jaminan akan benar-benar menjadi beban tersendiri bagi nasabah kredit sehingga ia akan sungguh-sungguh dalam pengembalian kreditnya.

Jika suatu lembaga bank maupun non bank memberikan pinjamannya tanpa jaminan maka akan sangat membahayakan kreditnya inilah yang terjadi pada UPK, tidak ada jaminan dalam kreditnya menjadi penyebab utama sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran terlebih lagi jika nilai-nilai sistem tanggung renteng

tidak dijunjung dengan baik inilah yang dapat membahayakan pinjaman yang diberikan, karena mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaiknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan.

Adapun cara mengatasi kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*resheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah.

3. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Piutang Pada UPK kec.

Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Efektivitas adalah keberhasilan suatu pertanggung jawaban terhadap tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, ketika kontribusi yang dihasilkan semakin mendekati sasaran tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian piutang oleh UPK Kec. Astambul Kab. Banjar penulis menganalisa berdasarkan beberapa indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Efektivitas berdasarkan rasio perhitungan kolektibilitas

Mengenai keefektifitasan penerapan sistem pengendalian piutang pada UPK Kec. Astambul Kab. Banjar pertama penulis menganalisa berdasarkan rasio perhitungan kolektibilitas yang telah diuraikan pada pembahahasan sebelumnya. Berdasarkan analisis kolektibilitas pada selama 3 tahun terakhir rata-rata persentase kolektibilitas untuk kategori lancar sebesar 84,52%, adapun angka rata-rata kredit *nonperforming loan* yang berada pada angka 9% dan masuk ke dalam kategori risiko sedang (moderat) yang artinya sudah dapat dikatakan cukup efektif dalam pengelolaan piutangnya.

b) Efektivitas berdasarkan perkembangan asset dan kelompok

Hasil wawancara penulis dengan subjek UPK 1 mengenai berapa asset dan kelompok yang dimiliki UPK selama tiga tahun terakhir, dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 13. Pertumbuhan Asset
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Tahun 2014 s/d 2016**

Tahun	Total Asset	Pertumbuhan	Jumlah Kelompok
2014	Rp 1.648.241.294,00	-	31
2015	Rp 1.724.773.375,00	Rp. 76.532.081,00	29
2016	Rp 1.840.367.598,00	Rp. 115.594.223,00	38

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pengamatan penulis dari tahun pertama dengan modal awal yang diberikan pemerintah pada pertama kali program diluncurkan yaitu sekitar 300 juta rupiah telah mengalami perkembangan setiap tahunnya, dilihat dari tabel diatas menunjukkan perkembangan asset UPK selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2014 asset yang dimiliki sebesar Rp.1.648.241.294,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga mencapai Rp.1.724.773.375,00 kenaikan pada tahun 2015 hanya sekitar 70 juta dikarenakan berdasarkan hasil analisis telah terjadi penurunan jumlah kelompok dan total pinjaman yang disalurkan. Meskipun demikian diakhir tahun 2016 asset telah mencapai Rp. 1.840.367.598,00, hal ini dikarenakan jumlah kelompok mengalami peningkatan. Adapun jumlah kelompok tahun 2014 adalah 31 kelompok, tahun 2015 ada 29 kelompok dan tahun 2016 sebanyak 38 kelompok.

Menganalisis hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kenaikan jumlah anggota kelompok SPP maka menggambarkan juga bahwa asset UPK sekian tahunnya bertambah, dengan bertambahnya kelompok berarti jumlah pengembalian angsuran yang dibayarkan beserta imbalan balas jasanya juga bertambah, dari sinilah modal atau asset UPK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketika setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan asset dan jumlah anggota maka dapat diketahui UPK dalam pengelolaan piutangnya cukup efektif karena tidak mungkin akan ada kenaikan asset dan pertambahan jumlah anggota jika angka kredit macetnya sangat tinggi.

c) Efektivitas berdasarkan prosedur perguliran

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 Ibu-Ibu dari kelompok SPP sepakat bahwa penerapan sistem piutangnya sudah cukup bagus yaitu dengan tanggung renteng, selain itu juga mekanisme penyaluran maupun pengembalian dan persyaratan yang mudah tanpa jaminan. Dana bergulir juga menjamin keberlangsungan piutang oleh UPK karena dana yang dikucurkan akan terus bergulir dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Hal tersebut dianggap oleh kelompok SPP telah menjadi kelebihan dari UPK dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Dan berdasarkan hasil analisis pada sistem pengendalian piutang prosedur/mechanisme yang mereka terapkan juga telah sesuai dengan SOP UPK Kec. Astambul Kab.

d) Efektivitas berdasarkan perkembangan kelompok

Hasil penelitian dari beberapa kelompok yang pada mulanya hanya diperkenankan meminjam 1-2 juta perorang hingga sekarang bisa mendapatkan pinjaman 7-10 juta rupiah perorang, contohnya seperti kelompok Bunga Tanjung di desa Kalampayan Tengah, Kakamban Habang di desa Limamar, Putri Pantai di desa Limamar, Bunga Desa di desa Limamar, dan Thalalabul Gufran di desa Sungai Tuan Hilir sekarang diperkenankan meminjam dana hingga 10 juta perorang. Adapun kelompok Anggrek Desa Kalampayan Hilir, Pandan Sari Desa Kaliukan dan Kenanga Desa Lok Gabang diperbolehkan meminjam 7-8 juta perorangnya. Oleh karena itu, kepercayaan dari UPK kepada kelompok juga sangat penting karena penambahan nominal pinjaman diberikan berdasarkan kelancaran kelompok dalam pembayaran tagihan, ketika kelompok tertentu dapat memenuhi kewajibannya dengan baik maka UPK akan memberikan kepercayaan dengan memperkenankan kelompok untuk meminjam dana lebih besar dari pinjaman sebelumnya.

Penulis kemudian juga menanyakan sudah berapa lama tergabung dalam kelompok SPP, berdasarkan hasil wawancara kelompok Ibu NH, RH, SA, LM dan NS sudah diberikan kepercayaan oleh UPK selama 10 tahun, kemudian kelompok Ibu AH yang 5 tahun pertama menjadi anggota 5 tahun terakhir menjadi ketua. Kemudian kelompok Ibu IS dan Ibu HL adalah kelompok yang baru terbentuk 4-5

tahun terakhir dan kelompok Ibu MI sudah 3 tahun terakhir ini bergabung. Adapun kelompok baru terbentuk yang berhasil ditemukan oleh penulis yaitu kelompok Ibu AL, kelompok beliau baru berjalan 5 bulan yang terbentuk atas inisiatif beliau sendiri dan keprihatian beliau kepada teman-teman yang terjatuh hutang dengan rentenir. Ketika kelompok tertentu mampu bertahan dengan jangka waktu yang lama maka akan membuktikan bahwa pengembalian atau angsuran dari kelompok SPP tersebut lancar, kemudian juga dengan adanya IPTW akan menjadi pendorong kelompok agar disiplin dalam membayar tagihan dengan tepat waktu. Jadi, keefektifitasan dilihat dari kelompok yang mampu bertahan hingga sekarang, mendapatkan IPTW dan setiap tahunnya mendapatkan peningkatan jumlah pinjaman artinya pengelolaan piutang yang mereka lakukan cukup efektif karena UPK tidak akan memberikan pinjaman kepada kelompok yang bermasalah.

e) Efektivitas berdasarkan dampak perekonomian kelompok

Kemudian dalam pengukuran tingkat keefektifitasan juga dilihat apakah ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada indikator yang ditanyakan. Berdasarkan hasil wawancara subjek SPP sepakat bahwa kehadiran UPK membawa dampak yang positif terhadap perekonomian anggota kelompok bahkan yang bukan anggota kelompok, karena beberapa usaha yang dijalankan dapat membuka lapangan pekerjaan. Hasil wawancara membuktikan bahwa memang terjadi perubahan dan sejumlah pencapaian sebagai berikut :

- 1) Ibu-Ibu yang pada awalnya hanya menjadi Ibu rumah tangga sekarang sudah mempunyai usaha sendiri.
 - 2) Ibu-Ibu yang sudah lebih dulu memiliki usaha mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
 - 3) Dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran.
 - 4) Meningkatkan partisipasi Ibu-Ibu dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya.
 - 5) Menumbuhkan rasa saling tolong-menolong.
 - 6) Semakin eratnya tali silaturahmi.
 - 7) Menjadikan Ibu-Ibu lebih produktif dan lebih mandiri dalam hal meningkatkan ekonomi keluarga.
- f) Efektivitas berdasarkan tujuan dari PNPM-MPd
- 1) Tujuan umum

UPK telah berhasil melakukan pencapaian yang positif dimana tujuan umum untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri telah berhasil dicapai oleh UPK Kec. Astambul, hal ini didasarkan pada hasil analisis setelah melakukan wawancara, yang mana sejumlah kontribusi telah berhasil dicapai sebagai berikut :

- a. UPK telah banyak menarik minat Ibu-Ibu untuk bergabung, karena berasal dari program pemerintah, persyaratan dan mekanisme penyaluran maupun pengembaliannya tergolong

mudah, sehingga menjadi kepuasan dan keuntungan sendiri bagi kelompok yang bergabung.

- b. Memberikan permodalan usaha secara bertahap dan berkelanjutan.
- c. Selama kurang lebih 10 tahun ini UPK telah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja melalui kelompok SPP.
- d. Pembiayaan yang diberikan tersebut dapat meningkatkan kemandirian dari Ibu-Ibu kelompok terbukti dengan usaha yang mereka rintis dapat menambah penghasilan rumah tangganya, bahkan ada yang dapat mengembangkan usahanya hingga membuka lapangan pekerjaan.

2) Tujuan khusus

Berdasarkan hasil wawancara UPK juga telah berhasil mencapai sejumlah kontribusi terkait dengan tujuan khusus dari PNPM-Mandiri sebagai berikut :

- a. UPK telah meningkatkan partisipasi Ibu-Ibu dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya.
- b. UPK telah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representif dan akuntabel.
- c. Melalui UPK pemerintah telah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan.

- d. Dapat meningkatkan sinergi masyarakat dan menjadi contoh untuk lebih mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatkan inovasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- f. Meningkatkan modal untuk melestarikan potensi lokal.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis kolektibilitas maka penulis menarik kesimpulan bahwa PNPM-MPd dengan pengelolaan yang dilakukan oleh UPK di kec. Astambul semakin mencapai tujuan dari diadakannya program tersebut, dengan sejumlah kontribusi yang didapatkan telah menggambarkan tingkat efektivitasnya cukup baik, ditambah lagi dengan dana yang dicairkan adalah dana bergulir sehingga dana tersebut akan terus berputar dari satu kelompok ke kelompok lainnya yang dapat menjamin keberlangsungan piutangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK Kec. Astambul Kabupaten Banjar adalah tanggung renteng dengan sanksi lokal. Tanggung renteng merupakan perjanjian piutang dimana tanggung jawab terhadap hutangnya ditanggung secara bersama-sama. Semua anggota yang tergabung dalam kelompok saling bertanggung jawab atas setiap keputusan yang akan diambil dan sanksi lokal diberlakukan untuk mengatasi kredit yang macet.
2. Kolektibilitas piutang selama tiga tahun terakhir berada pada persentase kolektibilitas untuk kategori lancar sebesar 84,52%, Dalam Perhatian Khusus 6,01 %, Kurang Lancar sebesar 2,36 %, Diragukan sebesar 0,55 % dan untuk Macet sebesar 6,55 %, dengan rata-rata *nonperforming loan* sebesar 9%. Persentase ini menunjukkan bahwa piutang selama tiga tahun terakhir cukup baik dengan kolektibilitas kredit lancarnya 84,52 % dan NPL nya berada pada kategori risiko sedang/moderat dengan angka 9%.
3. Keefektivitasan pengendalian piutangnya berdasarkan hasil rasio kolektibilitas dan NPL cukup baik sehingga piutangnya masih

berkelanjutan hingga sekarang dan sejumlah kontribusi yang diberikan semakin mendekati tujuan dari diluncurkannya program PNPM-Mandiri antara lain, telah dapat memberdayakan para Ibu-Ibu rumah tangga menjadi lebih mandiri dan produktif, meningkatkan taraf hidup dengan memberikan pembiayaan usaha guna meningkatkan perekonomian para RTM, dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menghindarkan dari para rentenir. Selain itu juga dengan sistem yang diterapkan dapat mengajarkan kerja sama, kedisiplinan dan juga saling menjaga tali silaturahmi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Dalam menjamin keberlangsungan piutangnya disarankan agar selalu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng dan selalu terjalin kerja sama yang baik dari semua pihak, seperti kepala Desa, Pengurus UPK, Ketua kelompok dan anggota kelompok, sehingga dapat terus memberikan manfaat kepada kelompok yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung dalam upaya meningkatkan perekonomiannya dan terus dapat membawa dampak positif bagi masyarakat disekitarnya.
2. Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas dengan penilaian pada kredit *nonperforming loan* keadaan kredit yang disalurkan hanya

tergolong kedalam cukup baik dengan risiko moderat, hal ini menandakan harus adanya pembenahan piutang melalui beberapa cara dalam penanganan masalah kredit macet agar tahun-tahun kedepannya rasio kolektibilitas semakin membaik dan rasio kredit *nonperforming loannya* semakin rendah.

3. Penulis menyarankan kepada UPK untuk menambah tenaga ahli untuk menjadi anggota kepengurusan UPK, karena pengurus inti saat ini hanya berjumlah 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dimana setiap dari mereka menanggung beban ganda seperti halnya dalam kepengurusan pencairan, kepengurusan pengembalian, bahkan penanganan kredit macet. Jadi, dengan adanya penambahan anggota diharapkan dapat dilakukan pembagian tugas secara efektif sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
4. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti bagaimana pengendalian piutang pada suatu lembaga bank maupun non-bank.

DAFTAR PUSTAKA

Telaah Buku

- Ali, Moh., Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat:Paragdigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009.
- Ashdow, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Bumi Aksara, 20014.
- B., Matthew, Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Terjemah oleh Tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1992.
- Baqir, Muhammad, Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Djunaidi, M. Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana , 2007.
- Irawan, Hengki, Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang Smart In Account Receivable*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2011.
- J., Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta : Kencana, 2010.
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, Syaamil Qur'an*, Bandung: Syaamil Quran, 2013.
- Laksono, Agung, *Menuju Indonesia Emas*, Jakarta : Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2013.

- Lestari, Sri, Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan*, Bandung : Fokus Media, 2012.
- M., Elly., Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2007.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Ciawi-Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Santoso, Imam, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradmya Paramita, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama. 2005.
- Sulistyo, Budi,Jodie Perdana kusuma dan Ninok leksono, dengan judul *MDGs Sebentar Lagi*, Jakarta, PT Gramedia , 2010.
- Sumarsan, Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* , Jakarta : Indeks, 2013.
- Supramono,*Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, 2013.
- Umar, M., Captra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, penerjemah Ikhwan Abidin b. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Telaah Jurnal

Ali Setiwan, “Analisis Pengaruh Manajemen Piutang dan Persediaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Jakarta Islamic Index Tahun 2008.” Diambil dari : <http://digilib.uin-suka.ac.id/1115/1/BAB%201%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. (Online Kamis 24 November 2016 Pukul 06:09 WIB).

Damianus Ding, Studi Tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.” [http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/08/jurnal%20Damianus%20Ding%20\(08-29-14-01-47-10\).pdf](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/08/jurnal%20Damianus%20Ding%20(08-29-14-01-47-10).pdf). (Online : Jumat 10 Juni 2016 Pukul 13:40 WIB).

I Gusti Putu, “Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Terhadap Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga sasaran di Kecamatan Abiansemai Kabupaten Bandung.” Diambil dari : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/viewFile/12357/9225>. (Online : Jumat 10 Juni 2016 Pukul 12:19 WIB).

Nor Aida, “Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mpd terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.” Diambil dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/618/1/SEMUA%20BAB.pdf>. (Online : Rabu 28 September 2016 Pukul 19:54 WIB).

Suci Andiani, Sunandar, Hetika, “Analisis Tingkat Perputaran Piutang Berdasarkan Kolektibilitas Kredit Pada Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) Harapan UPTD SMK 2 Tegal.” Diambil dari <http://id.portalgaruda.org/article.php?article=447836&val=9481>, (Online : Jumat 10 Juni 2016 Pukul 17:20 WIB).

Telaah Internet

Admin, “Kementerian Dalam Negeri Gelar Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014.” Diambil dari : [https://pnpmmmandiriperdesaankulonprogo.wordpress.com/2014/06/09/kementerian-dalam-negeri-gelar-penghargaan-pember dayaan-sikompak-2014/](https://pnpmmmandiriperdesaankulonprogo.wordpress.com/2014/06/09/kementerian-dalam-negeri-gelar-penghargaan-pember-dayaan-sikompak-2014/). (Online : Jumat 23 Oktober 2015 Pukul 20:17 WIB).

Admin, “Perputan piutang.” Diambil dari : <http://daddanuarta.blogspot.co.id/2014/11/perputaran-piutang-menurut-para-ahli-.html>. (Online : Rabu 01 Juni 2016 Pukul 16:22 WIB).

Admin, “Pengertian Hutang Piutang.” Diambil dari : <http://kafeilmu.com/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam/>. (Online : Sabtu 26 Maret 2016 Pukul 17:54 WIB).

Akbar, “Masalah Kemiskinan di Indonesia.” Diambil dari : <http://awangaliakbar.blogspot.co.id/2012/04/masalah-kemiskinan-di-indonesia.html>. (Online : Jumat 23 Oktober 2015 Pukul 20:17 WIB).

Dwidjo, “Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Mikro”. Diambil dari : <http://www.hupelita.Com/baca.Php?id=27383>. (Online : 04 Maret 2017 Pukul 20:37 WIB).

Istiningsih, “Analisis Kolektibilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Purworejo Cabang Bayan.” Diambil dari: <http://www.stierajawali.ac.id/artikeljurnal>

[/analisis-kolektibilitas-kreditpada-pd-bpr-bkk-purworejo-cabang-bayan/](#).

(online 27 Februari 2017 Pukul 21:25 WIB).

Muddin, “Peran Kelompok PNPM SPP.” Diambil dari : <https://bahagiamuddin.wordpress.com/2013/02/09/peran-kelompok-spp-pnpm/>. (Online : 22 Oktober 2015 Pukul 07:31 WIB).

Nanang Budianas, “Pengendalian Piutang dan Metode.” Diambil dari : [http://nanang budianas.blogspot.co.id/2013/03/pengendalian-piutang-dan-metode.html](http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/03/pengendalian-piutang-dan-metode.html). (Online : Sabtu 26 Maret 2016 Pukul 17:45 WIB).